

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN,
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI SURAKARTA
(Study Kasus di Kecamatan Laweyan)**

**TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**KUNTO HAMIDJOYO
D4E000110**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN, PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI SURAKARTA**

(Study Kasus di Kecamatan Laweyan)

Dipersiapkan dan disusun oleh

KUNTO HAMIDJOYO

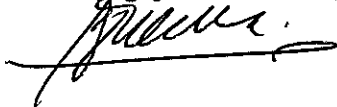
NIM : D4E000110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Pebruari 2004

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD
Sekretaris Penguji/Pembimbing II




Drs. Ali Mufis, MPA

Anggota Tim Penguji :




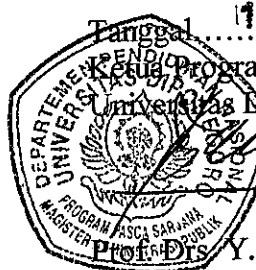
1. Prof. Drs. Hartoyo



2. Dra. Retno Sunu Astuti, MSi

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain.

Tanggal 12 FEB 2004
Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro Semarang

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD



iii

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	3531/T/MAP/ej...
Tgl.	3/3 08

ABSTRAKSI

KUNTO HAMIDJOYO, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan)*, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2004.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi dilema disetiap wilayah. Pada satu sisi kegiatan ini menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pada sisi lain dianggap menjadi "Penyakit" karena mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Persoalan PKL seakan-akan tidak pernah bisa tuntas karena pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tidak mudah. Disatu sisi pemerintahan berkewajiban menyediakan lahan pekerjaan bagi warga, disisi lain ketertiban kota dan pemetaan tata guna lahan membutuhkan ketegasan tersendiri. Dalam kondisi yang dilematis tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Penataan, Pembinaan dan Penertiban PKL yang tertuang pada Perda No. 8 Tahun 1995.

Penelitian ini mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta dengan studi kasus di Kecamatan Laweyan Surakarta. Jumlah populasi 708 PKL, teknik pengambilan sampel random sampling dan jumlah sampel 240 PKL. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Pengujian ketepatan pertanyaan menggunakan uji validitas korelasi *Product Moment Pearson* dan pengujian realibitas dengan uji realibilas *Alpha Chronbach*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta sebesar 66.22% sedangkan yang 33.78% ditentukan oleh variabel lain. Dari uji determinasi 66.22%, kondisi lingkungan menyumbang sebesar 25%, komunikasi menyumbang sebesar 53% dan perilaku pelaksana menyumbang 22%. Dengan demikian apabila variabel kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana mengalami kenaikan, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih baik.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi lingkungan, meningkatkan komunikasi, dan perilaku pelaksana disamping diperlukan peningkatan variabel lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut selain dari ketiga variabel bebas tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, Kondisi lingkungan, Komunikasi, Perilaku pelaksana*

ABSTRACT

KUNTO HAMIDJOYO, *An Analysis on Factors Influencing the Successful Implementation of Sidewalk Trader Structuring, Building, and Ordering Policy in Surakarta (A Case Study in Subdistrict Laweyan)*, Thesis. Magister of Public Administration, Postgraduate Program, Diponegoro University, 2004.

Sidewalk trader existence always becomes a dilemma in every region. On the one hand, this activity can be an income source for a part of society and can move economic wheel. On the other hand, it is considered as "a disease" because it can disturb cities beauty and order. Sidewalk trader problems are as if an ever lasting ones because government always encounters uneasy choices. In one side, government is obliged to provide the environment area for its citizen, but in another one, city order and area resource mapping also need a prominent provision. In the dilemmatic condition, the government issues its policy about Sidewalk Trader Structuring, Building, and Ordering contained in Perda No. 8. Year 1995.

This research explores the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government and conducted a case study in Subdistrict Laweyan, Surakarta. Total population of this research is 708, and sampling technique employed is random sampling. Total sample is 240, and research instruments employed are questionnaire, interview and documentation.

Questions validity test used in this research is Product Moment Pearson correlation dan reliability test of Alpha Chronbach.

The result shows that there is a significant effect between environment condition, communication, and implementer behaviour on the successful implementation of Perda No.8 Year 1995 Surakarta Local Government of 66.22%, while another 33.78% is determined by other variable. From the determination of 66.22%, environment condition contributes 25%, communication contributes 53% and implementer behaviour contributes 22%. Thus, if there is an increase in environment condition, communication, and implementer behaviour, the successful implementation of the policy will increase as well.

Thus, an increase in the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government in Subdistrict Laweyan can be achieved by improving the environment condition, communication and implementer behaviour in addition to improve other variable that need to be explored further rather than those three independent variables.

Keywords: Policy Implementation, Environment Condition, Communication, and Implementer Behaviour

RINGKASAN

KUNTO HAMIDJOYO, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan)*, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2004.

Penelitian pada tesis ini, bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kondisi lingkungan, Komunikasi, Perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan). Populasi penelitian ini berjumlah 708. Teknik pengambilan sampel dengan random sapling sesuai dengan tabel Krejcie dan Nomogram Hary King sehingga diperoleh sampel 248 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil pengumpulan data kuesioner terkumpul 240 responden, sehingga data yang diolah $N=240$. Uji validitas menggunakan Korelasi Produk Moment Pearson dan uji reliabelitas dengan Alpha Cronbach.

Hasil uji validitas menunjukkan valid (syahih) karena didapatkan nilai lebih dari 0.5 dan hasil uji reliabilitas menunjukkan relatif baik dan reliabel karena $N=240$ nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% $=0,128$ sedangkan hasil uji reliabilitas $>0,128$.

Hasil penelitian secara deskriptif dapat digambarkan kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana pada kategori relatif sedang. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Surakarta. Pernyataan di atas berdasarkan hasil hitung koefisien korelasi determinasi (R^2) = 66,22% artinya variasi di dalam keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ditentukan oleh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana sebesar 66,22%. Dari 66,22% kondisi lingkungan menyumbang sebesar 16,68%, komunikasi menyumbang sebesar 35,13%, perilaku pelaksana menyumbang 14,41%. Sedangkan sisanya sebesar 33,78% ditentukan oleh variabel lain. Pengujian hipotesis dengan taraf kesalahan 0,05 pada hipotesis minor pertama yaitu pengaruh kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.523$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N=240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05, maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” **diterima**. Pengujian hipotesis minor kedua yaitu pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.712$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N=240$ yang berarti signifikan yang tinggi pada taraf kesalahan 0,05, maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” **diterima**. Pengujian hipotesis minor ketiga yaitu pengaruh perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dengan

hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.693$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N=240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05, maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel perilaku pelaksana dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” **dapat diterima**. Pengujian hipotesis mayor yaitu pengaruh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, dengan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0,814$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N=240$ taraf signifikan 5% yang berarti signifikan, maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan” **dapat diterima**.

Hasil penelitian di atas disarankan diperlukan perbaikan pada sistem penataan PKL, tata cara pelaksanaan penataan, pembinaan dan penertiban PKL agar PKL merasakan kemanfaatan yang cukup tinggi. Pengenaan sanksi dilakukan secara tegas bagi pelanggar zona larangan. Peningkatan pemeliharaan pada kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi. Perlu peningkatan pemahaman bagi para pelaksana terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi peraturan, dan penerima pesan dalam hal ini PKL mendapatkan kejelasan tentang Perda No. 8 Tahun 1995.

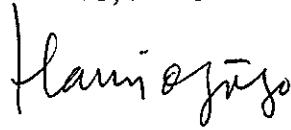
PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI SAYA :

NAMA : KUNTO HAMIDJOYO
NIM : D4E000110
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

MENYATAKAN BAHWA, DALAM TESIS INI TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DI SUATU PERGURUAN TINGGI DAN JUGA TIDAK TERDAPAT KARYA ATAU PENDAPAT YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH ORANG LAIN KECUALI SECARA TERTULIS DISEBUTKAN DALAM NASKAH INI PADA DAFTAR PUSTAKA.

SEMARANG, JANUARI 2004



KUNTO HAMIDJOYO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Kita memang harus terus berjalan, bergerak, lurus menuju matahari, menjaga dan menyangganya agar matahari tidak runtuh. (*Tsurinci*)
2. *Long Life Education.*
3. Masalah merupakan batas penentu yang membedakan antara sukses dan gagal dan masalah akan membangkitkan keberanian dan konsentrasi karena memang sebenarnya masalah itu bersifat rohaniah (*Scoot Peck*).

Karya ini saya persembahkan kepada yang tercinta ;

- ◆ Alm. Ayahanda Suhardjo Notohamidjoyo
- ◆ Alm. Ibunda Mursini Notohamidjoyo

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tugas tesis yang berjudul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURAKARTA (Study Kasus di Kecamatan Laweyan). Laporan penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan dan mencapai gelar derajat Magister Sain (S-2).

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.A, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Pembimbing Utama.
3. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si, selaku Penguji yang telah mengarahkan dan memotivasi terwujudnya penulisan ini.
5. Bapak Drs. Bambang Santoso, MM., selaku Kepala Kantor Pengelolaan PKL Surakarta.
6. Bapak Dwi Susetyo, SH., selaku Kasi penertiban Kantor Pengelolaan PKL Surakarta.
7. Komisi B DPRD Kota Surakarta.

8. Bapak Wid Sukamto, selaku Ketua Paguyuban PKL RAS (Rukun Agawe Santoso) Surakarta.
9. Bapak Supono, S.Sos, selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta.
10. Keluarga Besar SOMPIS (Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta)
11. Bapak Edy Sarnyoto, selaku Ketua GUDANG KALIMAS (Paguyuban pedagang Kaki Lima dan Asongan Surakarta).
12. Bapak Setiajid, selaku Ketua Paguyuban PKL "Samirukun" Surakarta
13. Bapak Mukti, selaku Ketua Paguyuban PKL "Ronggolawe" Surakarta
14. Para PKL Kecamatan Laweyan Surakarta yang telah proaktif dalam penelitian ini.
15. Seluruh Staf Pengajar Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
16. Seluruh Staf Administrasi Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
17. Teman-teman Angkatan II Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
18. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam memperlancar penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan, maka hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan membantu penulis dalam perbaikan dan penyusunan selanjutnya.

Harapan penulis dengan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Pebruari 2004

KUNTO HAMIDJOYO

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Implementasi Kebijakan (Variabel Y)	14
2. Kondisi Lingkungan (Variabel X1)	29
3. Komunikasi (Variabel X2)	31
4. Perilaku Pelaksana (Variabel X3)	35
B. Pembahasan Penelitian yang Relevan	37
C. Hipotesis	39
BAB III : METODE PENELITIAN	41
A. Rancangan Penelitian.....	41
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	42

C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Variabel Penelitian.....	43
1. Klasifikasi Variabel	43
2. Definisi Konseptual.....	43
3. Definisi Operasional.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	47
H. Teknik Pengumpulan Data	49
I. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil penelitian	53
1. Deskripsi responden	53
2. Gambaran tentang Implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.	54
3. Gambaran tentang Kondisi Lingkungan	81
4. Gambaran tentang Komunikasi.....	90
5. Gambaran tentang Perilaku Pelaksana	100
B. Uji Validitas dan Realibilitas	108
1. Uji Validitas	108
2. Uji Realibilitas	113
C. Uji Hipotesis.....	118
1. Uji Hipotesis Minor Pertama	118

2. Uji Hipotesis Minor Kedua	121
3. Uji Hipotesis Minor Ketiga	123
4. Uji Hipotesis Mayor.....	126
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	127
1. Sumbangan Relatif.....	131
2. Sumbangan Efektif	133
BAB IV. : KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Elemen Kebijakan	15
Gambar II.2 : Kerangka Analisis Kebijakan	16
Gambar II.3 : Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	23
Gambar II.4 : Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle.....	24
Gambar II.5 : Model Implementasi Kebijakan menurut Masmanian dan Sabatier	28
Gambar II.6 : Kerangka Perilaku Individu.....	36
Gambar II.7 : Model Perilaku Kelompok	37
Gambar II.8 : Geometrical Model Hipotesis	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jumlah PKL di Surakarta Tiap Kecamatan	5
Tabel I.2 : Jumlah PKL di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.....	5
Tabel III.1 : Jumlah PKL tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.....	48
Tabel III.2 : Penentuan Jumlah Sampel PKL.	49
Tabel IV.1 : Tingkat perhatian PKL terhadap kegiatan pembinaan.....	56
Tabel IV.2 : Jumlah kegiatan pembinaan PKL.....	56
Tabel IV.3 : Manfaat kegiatan PKL.....	57
Tabel IV.4 : Cara pembinaan PKL.....	57
Tabel IV.5 : Waktu pelaksanaan pembinaan PKL.....	58
Tabel IV.6 : Pelaksanaan penataan PKL.....	59
Tabel IV.7 : Cara penataan PKL.....	60
Tabel IV.8 : Sifat penataan PKL.....	60
Tabel IV.9 : Manfaat pelaksanaan penataan.....	61
Tabel IV.10 : Desain penataan.....	61
Tabel IV.11 : Kepatuhan anggota PKL terhadap program penataan.....	62
Tabel IV.12 : Pelaksanaan penertiban PKL.....	63
Tabel IV.13 : Cara Penertiban PKL.....	64
Tabel IV.14 : Sifat Pelaksanaan Penertiban PKL.....	65
Tabel IV.15 : Manfaat Pelaksanaan Penertiban	65
Tabel IV.16 : Kepatuhan PKL terhadap Program Penertiban	66
Tabel IV.17 : Kehadiran PKL pada Kegiatan Penyuluhan	67
Tabel IV.18 : Hubungan sesama PKL dalam Kegiatan Penyuluhan	67
Tabel IV.19 : Situasi Lingkungan Kerja.....	68
Tabel IV.20 : Keuntungan Penyuluhan terhadap PKL.....	69
Tabel IV.21 : Hasil Penyuluhan terhadap PKL.....	70
Tabel IV.22 : Peningkatan setelah Mendapat Pembimbingan	71
Tabel IV.23 : Kelangsungan usaha setelah mendapat Pembimbingan....	71

Tabel IV.24 :	Jumlah Peserta Kemitraan Usaha setelah mendapat Pembinaan	72
Tabel IV.25 :	Jumlah Kemitraan Usaha Setelah Mendapat Pembinaan...	73
Tabel IV.26 :	Kelangsungan Hubungan Kemitraan.....	74
Tabel IV.27 :	Masalah yang Dihadapi PKL.....	75
Tabel IV.28 :	Sifat Masalah	76
Tabel IV.29 :	Cara Pemecahan Masalah Yang Disarankan Seksi Pembinaan PKL.....	77
Tabel IV.30 :	Kesesuaian Dasarannya yang dilakukan PKL dengan yang diajarkan Seksi Pembinaan PKL.....	77
Tabel IV.31 :	Kepatuhan PKL terhadap Zona Larangan.....	78
Tabel IV.32 :	Tingkat Pengenaan Sanksi Pelanggar Zona Larangan	79
Tabel IV.33 :	Distribusi Frekuensi Implementasi kebijakan	80
Tabel IV.34 :	Kerjasama PKL dalam Perwujudan Kebersihan Lingkungan.....	82
Tabel IV.35 :	Kerjasama PKL dalam Perwujudan Keindahan Lingkungan.....	83
Tabel IV.36 :	Kerjasama PKL dalam Perwujudan Kenyamanan Lingkungan.....	84
Tabel IV.37 :	Kerjasama PKL dalam Perwujudan Keamanan Lingkungan.....	84
Tabel IV.38 :	Kemacetan Lalu lintas di Lingkungan PKL.....	85
Tabel IV.39 :	Kecelakaan Lalu lintas di Lingkungan PKL.....	86
Tabel IV.40 :	Persetujuan Warga Setempat terhadap Usaha PKL.....	87
Tabel IV.41 :	Keramahan Warga Setempat terhadap Usaha PKL.....	88
Tabel IV.42 :	Distribusi Frekuensi Kondisi Lingkungan	89
Tabel IV.43 :	Pemahaman PKL terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan, Pembinaan, dan Penertiban PKL.....	91
Tabel IV.44 :	Keterlibatan Kelompok PKL dalam Membuat Perda No. 8 Tahun 1995.....	92
Tabel IV.45 :	Peran Serta Kelompok PKL dalam Membuat Perda No. 8 Tahun 1995.....	92

Tabel IV.46 :	Kemampuan Pelaksana Penyuluhan.....	93
Tabel IV.47 :	Kemampuan Pelaksana Pembinaan	94
Tabel IV.48 :	Kemampuan Pelaksana Penertiban	95
Tabel IV.49 :	Kesesuaian isi Peraturan dan Pelaksanaan	96
Tabel IV.50 :	Tingkat Kejelasan Penyuluhan pada PKL.....	97
Tabel IV.51 :	Tingkat Kejelasan Program tentang PKL.....	97
Tabel IV.52 :	Distribusi Frekuensi Komunikasi.....	98
Tabel IV.53 :	Ketepatan waktu Kedatangan Petugas Penyuluhan	101
Tabel IV.54 :	Tingkat Keseriusan Pembinaan PKL.....	101
Tabel IV.55 :	Tingkat Keseriusan Penertiban PKL.....	102
Tabel IV.56 :	Tingkat Keseriusan Penyuluhan PKL	103
Tabel IV.57 :	Tingkat Kejujuran Pelaksana Penertiban PKL.....	104
Tabel IV.58 :	Tingkat Kejujuran Penarikan Retribusi PKL.....	104
Tabel IV.59 :	Tindakan Sanksi terhadap PKL Pelanggar Ketertiban	105
Tabel IV.60 :	Distribusi Frekuensi Perilaku Pelaksana	106
Tabel IV.61 :	Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan	109
Tabel IV.62 :	Hasil Uji Validitas Variabel Kondisi Lingkungan	110
Tabel IV.63 :	Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi	111
Tabel IV.64 :	Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Pelaksana	112
Tabel IV.65 :	Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Implementasi Kebijakan	113
Tabel IV.66 :	Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Kondisi Lingkungan ..	114
Tabel IV.67 :	Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Komunikasi	115
Tabel IV.68 :	Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Perilaku Pelaksana	116
Tabel IV.69 :	Rangkuman Uji Reliabelitas.....	117
Tabel IV.70 :	Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Kondisi Lingkungan	118
Tabel IV.71 :	Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Komunikasi	121
Tabel IV.72 :	Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Perilaku pelaksana	124

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matrik Operasional Variabel Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara (Interview Guide)
- Lampiran 4 : Data Tabulasi Penelitian
- Lampiran 5 : Data Hasil Penelitian
- Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan amat besar peranannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis dan resiprokal antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1990 sekitar 55,5 juta orang (30,00%) tinggal di perkotaan dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 75,3 juta (37,00%). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari 20,5 juta (17,00%) pada awal 1970-an (Biro Pusat Statistik Jawa Tengah 1970, 1990, 2000)

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk kota Surakarta mengalami peningkatan yang tajam, karena kota Surakarta selain berfungsi melayani masyarakat kota secara administratif juga berperan melayani masyarakat regional yaitu daerah-daerah sekitar kota Surakarta tanpa melihat batas administrasi pemerintahan, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri,

Sragen dan Klaten (Subosuko Wonosraten). Pertumbuhan penduduk kota Surakarta yang semakin pesat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja yang jika tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peluang lapangan kerja. Kondisi saat ini peluang lapangan pekerjaan sektor formal memerlukan persyaratan – persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh pencari kerja, dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan mereka yang serba terbatas.

Perkembangan ekonomi kota Surakarta sebagaimana yang terjadi pula di kota – kota Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor formal saja tetapi juga terjadi pada sektor informal. Kota Surakarta mempunyai sifat dualisme modern formal dengan informal tradisional yang mengandung berbagai macam fungsi yaitu sebagai kota perdagangan, industri, pendidikan, budaya, pemerintahan dan fasilitas sosial dimana setiap fungsi memiliki skala pelayanan yang berbeda-beda.

Perkembangan Kota Surakarta juga diwarnai oleh terjadinya krisis ekonomi Nasional yang dimulai pada tahun 1997 yang meluas menjadi krisis disegala bidang (multi dimensional), seperti fundamental perekonomian yang lemah, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan semakin terlihat sangat memprihatinkan.

Keadaan ini menimbulkan beberapa permasalahan di kota Surakarta sehingga menimbulkan berbagai dampak yang perlu ditangani dengan seksama. Salah satu aspek yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian nasional adalah meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta. Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah Pedagang kaki lima di kota Surakarta merupakan imbas dari meningkatnya

jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Widodo, 2000:3)

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang tak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian yang terjadi diwilayah Surakarta, kemerebakan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangatlah wajar jika kemudian saat pemerintah berupaya melakukan penataan kadang-kadang timbul kesalah pahaman (Suara Merdeka, 15 April 2003).

Masalah penataan PKL memang ada dua sisi yang paling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, saat melakukan penataan ada tujuan berbeda dan itu bisa saja bertentangan antara pedagang dan pemerintah. Disatu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain keberadaan PKL itu juga menyangkut tentang nafkah hidup orang yang kemudian tidak bisa begitu saja berhenti. "Sebenarnya kami sadar upaya pemerintah itu bertujuan baik. Ingin kota yang bersih dan teratur. Namun disisi lain keberadaan ini juga untuk mencari nafkah. Dua hal inilah yang harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak saling merugikan di antara keduanya," kata Sugiman, Bendahara Paguyuban Pedagang Kaki Lima "Sringapono".

Sementara menurut Warni (Pedagang), sebenarnya tidak ada niatan pedagang untuk membuat kotornya lingkungan. Tujuan awal hanya semata untuk mencari

nafkah guna menghidupi keluarga. “ Hanya itu tujuan kami. Kami mohon maaf kepada pihak pemerintah untuk memahami jika kadang-kadang kami seperti terlihat ngeyel” kata dia. (Suara Merdeka, 15 April 2003)

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi dilema disetiap wilayah. Pada satu sisi kegiatan ini menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pada sisi lain dianggap menjadi “Penyakit” karena mengganggu keindahan dan ketertiban kota (Suara Merdeka, 17 Maret 2003). Sehingga kadang kala membuat perdebatan pro dan kontra dalam penanganannya.

Persoalan PKL seakan-akan tidak pernah bisa tuntas karena pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tidak mudah. Disatu sisi pemerintahan berkewajiban menyediakan lahan pekerjaan bagi warga, disisi lain ketertiban kota dan pemetaan tata guna lahan membutuhkan ketegasan tersendiri (Suara Merdeka, 10 April 2003). Simaklah misalnya keluhan Hartati salah satu PKL di jalan simpang yang tidak bisa mengira kiosnya akan dibongkar yang merasa aman karena sudah membayar Rp.1000/hari. Dia mengaku mengeluarkan Rp.15 juta untuk membuat warung. “Saya berharap pemerintah kota membantu kami” (Suara Merdeka, 10 April 2003).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kota Surakarta khususnya di kecamatan Laweyan hingga saat ini menurut sebagian besar masyarakat kota Surakarta masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang mengambil tempat sangat strategis di berbagai sudut kota. Selain itu produk dan jasa yang ditawarkan sangat kompetitif sementara jenisnya juga sangat bervariasi sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Di bawah ini disajikan data tentang jumlah pedagang kaki lima di Surakarta sampai dengan tahun 2002.

Tabel I.1

Jumlah PKL di Surakarta Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Laweyan	708
2	Serengan	519
3	Pasar Kliwon	426
4	Jebres	501
5	Banjar sari	1236
Jumlah		3390

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002

Tabel I.2

Jumlah PKL di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

No	Kalurahan	Jumlah PKL
1	Pajang	104
2	Laweyan	7
3	Bumi	39
4	Panularan	39
5	Penumping	39
6	Sriwedari	96
7	Purwosari	91
8	Sondakan	75
9	Kerten	73
10	Jajar	61
11	Karang Asem	35
Jumlah		708

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002

Banyaknya jumlah PKL tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi pemerintah kota Surakarta diantaranya :

1. Terganggunya fasilitas umum / prasarana kota

Dibeberapa tempat dapat dijumpai trotoar yang mestinya untuk pejalan kaki tidak dapat berfungsi karena telah ditempati PKL. Taman Monumen Banjarsari yang seharusnya tempat terbuka sebagai paru-paru kota sekarang sudah penuh dengan PKL klitikan

2. Terjadinya benturan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK).

Lokasi yang sekarang ditempati PKL tidak sesuai dengan RUTK yang ada. Misalnya di Monumen 45 Banjarsari (Solo Pos, 14 Januari 2003).

3. Dampak lingkungan Perkotaan

Banyaknya PKL yang menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kekumuhan, padahal Surakarta terkenal dengan slogan Berserinya (Bersih, Sehat, Rapi, Indah). Berkembangnya PKL disatu ruas jalan kadang mengganggu arus lalu lintas, misalnya disekitar pasar Klewer.

Pertumbuhan PKL di kota Surakarta merupakan masalah dilematis. Hal ini bersifat dilematis karena menyangkut nafkah masyarakat kecil. Berdasar dari pendapat Kasi Penertiban Kantor Pengelolaan PKL, Bapak Dwi Susetya, SH, salah satu dilema yang sangat menonjol adalah sebagian PKL banyak yang melanggar ketentuan tentang Penetapan Lahan / Lokasi PKL. Hal ini terlihat dari fasilitas yang dimiliki PKL, mulai dari listrik dengan meteran resmi dari PLN, sumur pompa, juga dari segi bangunannya tidak sedikit dari mereka yang berjualan disitu juga digunakan

sebagai tempat tinggal. Di lain pihak, keberadaan PKL yang tidak tertata jelas mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dalam arti tata kota yang modern. Bahkan untuk mengontrol PKL resmi yang terdaftar dan berizin pun, pemerintah mengalami berbagai kendala.

Melalui berbagai kebijakan dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995. pemerintah Kota Surakarta mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari diterbitkannya kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 adalah untuk melaksanakan :

- a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan wilayah kota dengan keterlibatan para pelaku kebijakan.
- b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi.
- c. Terjaminnya pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 8 tahun 1995 ini pelaksanaannya telah diserahkan langsung ke Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta. Pada dasarnya, Perda No. 8 tahun 1995 ini melarang pedagang kaki lima untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota, mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan,

memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Namun demikian dalam kenyataannya semua ketentuan dan larangan yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat.

Dalam hal ini peranan Gudang Kalimas (Gabungan Pedagang Kaki Lima Surakarta) Kota Surakarta turut menentukan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Salah satu program pemberdayaan PKL yang melibatkan Gudang Kalimas dengan sekitar 3.000 PKL anggotanya, adalah melakukan penertiban secara mandiri. Berdasarkan keterangan dari Bapak Edy Sanyoto ketua dari Gudang Kalimas dinyatakan bahwa mereka telah berusaha menertibkan anggotanya agar tidak menempati daerah larangan, dan sebenarnya PKL tak butuh tempat yang mewah (Bengawan Pos, 5 Maret 2003). Tetapi, kenyataan di lapangan tidak sedikit para pedagang yang bukan merupakan anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima nekat menempati daerah larangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PKL tidak diimbangi dengan pertumbuhan tempat yang tidak memadai.

Sejalan dengan reformasi, perilaku dalam masyarakat khususnya di Kota Surakarta mulai berubah. Euforia reformasi yang berlebihan membuat masyarakat lebih berani bertindak diluar aturan. Bahkan berbagai pelanggaran dilakukan secara terang-terangan, tanpa perasaan takut sewaktu-waktu ditindak. Jika pada masa lalu dapat kita lihat bahwa tidak ada PKL yang berani membuka dasaran di sembarang tempat seperti di atas saluran air atau trotoar jalan protokol maka keadaannya kini dapat bertolak belakang. Seiring dengan krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, kios-kios PKL kini semakin menjamur dimana-mana. Dalam waktu

singkat jumlah PKL semakin bertambah dan menambah kekhawatiran dari Pemkot Surakarta.

Ketiadaan pemahaman aturan seperti peraturan-peraturan daerah yang sudah usang yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif (DPRD) seringkali hanya menjadi perangkat hukum yang hanya dipahami oleh segelintir khalayak masyarakat dengan semakin meningkatnya pelanggaran.

Dengan melihat kondisi yang ada maka apabila subyek tidak ditangani secara sistematis akan mengakibatkan beberapa permasalahan dan konflik yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya aturan undang-undang mengenai pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dan SK Walikota No. 2 tahun 2001 ini dikeluarkan seiring dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi kota Surakarta pada khususnya.

Beberapa kasus seperti penyalahgunaan lahan dan penyerobotan ruang publik yang pada perencanaan awalnya tidak diperuntukkan untuk usaha PKL misalnya trotoar yang berfungsi untuk jalan kaki serta tempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan seperti bahu jalan, jembatan penyeberangan, taman dan lain-lain. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri diperkotaan seperti terganggunya pejalan kaki, bahkan pada daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya kebersihan dan keindahan kota.

Sementara kasus lainnya adalah pendirian bangunan untuk lokasi usaha PKL di tempat terlarang dan tidak mengindahkan aspek lingkungan sekitarnya dengan

mendirikan bangunan permanen secara liar. Hal ini juga sangat merugikan lingkungan kota, sebagai contoh pembangunan kios-kios PKL di atas saluran air pada suatu waktu akan menjadi bencana dengan tidak terkontrolnya saluran air akibat tertutupnya saluran tersebut dengan lantai bangunan PKL. Dengan demikian, tidak efektifnya Perda No. 8 / 1995 akan berdampak negatif pada masalah kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelestarian lingkungan kota.

Oleh karena itu setelah melihat latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai keberhasilan Implementasi Perda No. 8 tahun 1995 guna mencari alternatif dan solusi kebijakan Perda dalam mengatasi sektor informal Pedagang Kaki Lima untuk menambah wawasan dalam konteks kebijakan publik di Kota Surakarta.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini dilakukan setelah mengetahui adanya beberapa hambatan dan permasalahan yang menyangkut perilaku PKL terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 dalam hal :

1. Adanya kecenderungan pemanfaatan lokasi yang strategis secara ekonomi, sosial ataupun politik untuk dijadikan tempat berdagang bagi pedagang kaki lima.
2. Adanya hambatan komunikasi dari pembuat kebijakan dengan pedagang kaki lima terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.
3. Adanya perbedaan persepsi, kurangnya netralitas, kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda No. 8 Tahun 1995.

C. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan mengenai Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kondisi lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ?
2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ?
3. Apakah perilaku pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995?
4. Apakah kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka secara umum tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Kondisi Lingkungan berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan Surakarta
2. Untuk mengetahui apakah Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan Surakarta.

3. Untuk mengetahui Perilaku Pelaksana di Kota Surakarta berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan Surakarta.
4. Untuk mengetahui Kondisi lingkungan, Komunikasi, dan Perilaku pelaksana berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta sebagai masukan untuk menentukan kebijakan mendatang, terutama dalam perencanaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Bagi ilmu pengetahuan, dimana hasil penelitian ini akan menambah masukan dalam khasanah dunia ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.
3. Bagi peneliti yang lain agar dapat digunakan dalam melanjutkan penelitian tentang implementasi Kebijakan.
4. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka disajikan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II. Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang pengertian Implementasi Kebijakan, Kondisi Lingkungan, Komunikasi dan Perilaku Pelaksana.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini berisi desain penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

Bab IV. Analisis Data

Bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum obyek penelitian, proses dan hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan Saran Implimentasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hipotesis dan masalah penelitian, implikasi pada teori-teori manajemen, implikasi pada kebijakan manajemen, keterbatasan penelitian dan agenda untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

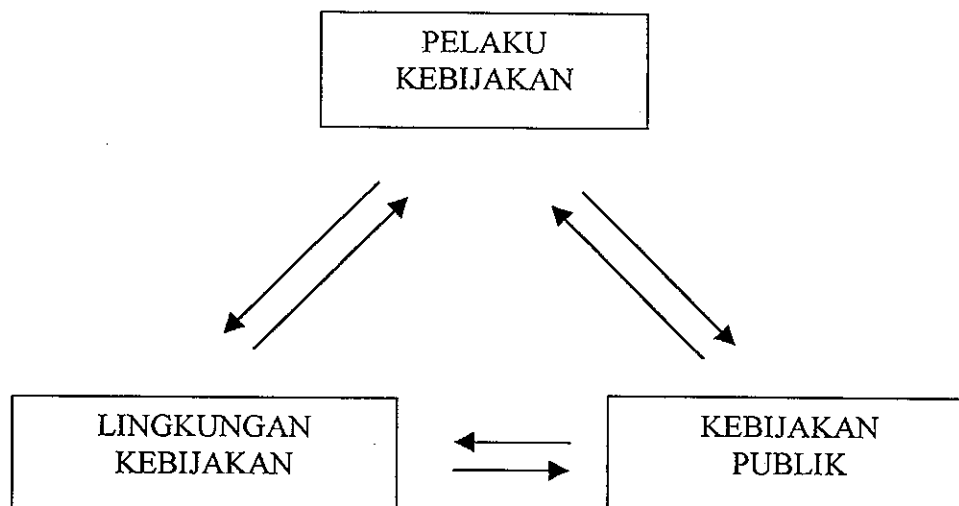
A. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan (Variabel Y)

Masalah kebijakan (*Policy Problems*) adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan mengenai problem apa yang hendak dipecahkan memerlukan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem (masalah) maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntun kepada pemecahan masalah. Penyediaan informasi mengenai masalah kebijakan merupakan suatu tugas yang paling penting dan paling sulit dalam analisis kebijakan. Hal ini disebabkan oleh problem (masalah) yang dipecahkan akan menentukan kemampuan kita menemukan dan mengidentifikasi pemecahan yang sesuai. Kekurangan atau kesalahan informasi pada tahap analisis ini dapat menimbulkan kesalahan fatal, merumuskan secara sah yang seharusnya dirumuskan secara benar.

Gambar II.1

Elemen Kebijakan



Sumber : Dunn, 2000

Sistem kebijakan (*Policy System*) atau pola pelaku institusional melalui kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen penting yang memiliki hubungan timbal balik yaitu :

1. Kebijakan Publik (*Public Policies*)

Merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak sama sekali) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat.

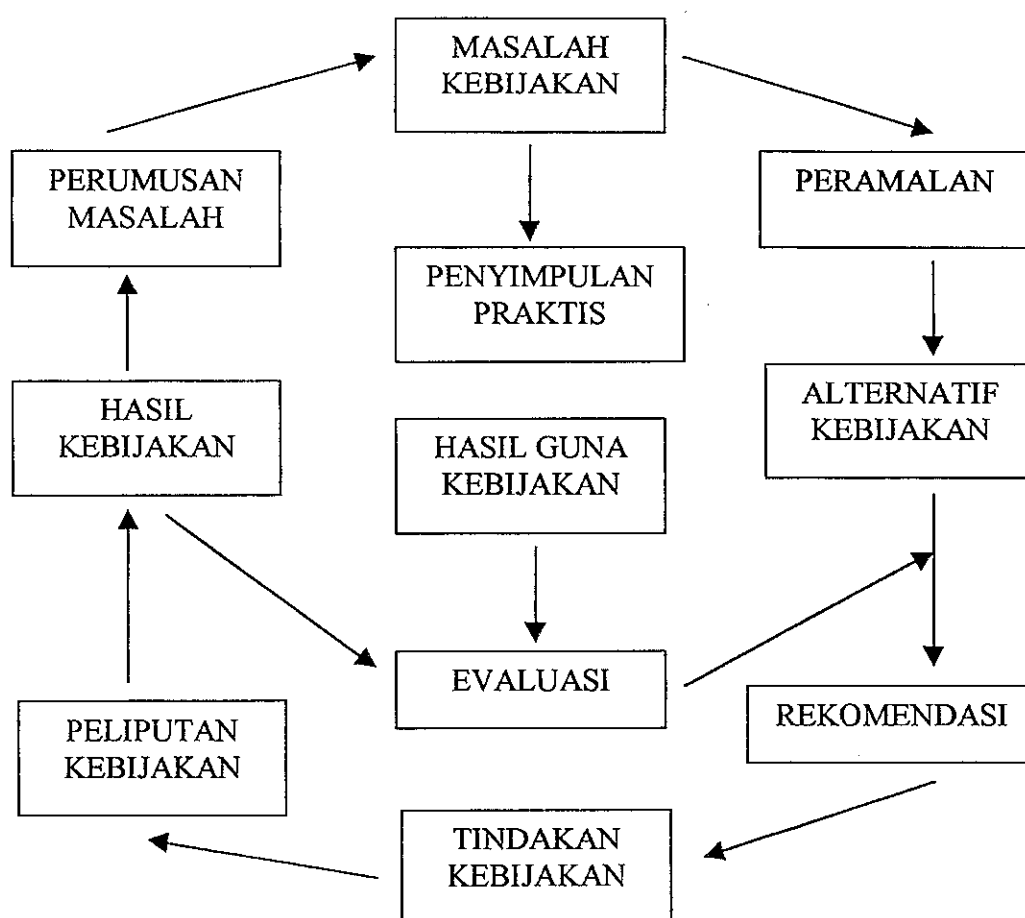
2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yaitu suasana tertentu dimana kejadian-kejadian disekitar isu kebijakan tersebut timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik.

3. Pelaku Kebijakan

Pelaku kebijakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok pelaku kebijakan yang dapat menciptakan dan menghasilkan sistem kebijakan dalam sistem yang berlaku di lingkungan kebijakan. Dalam penelitian ini pelaku kebijakan diambil dari pihak pedagang kaki lima sebagai responden.

Gambar II. 2 Kerangka Analisis Kebijakan



Sumber : Dunn, 2000

Implementasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*implementation*" yang berarti pelaksanaan. Istilah implementasi melahirkan beberapa definisi dari beberapa pendapat yang beragam. Menurut kamus Webster (dalam Wahab, 1991: 64) implementasi diartikan sebagai berikut :

"...to implement is to provide the means for carrying out and to give practical effect to ..." ("mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak akibat tertentu")

Sedangkan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1991: 50) adalah

"Those actions by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions" ("Tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan")

Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 1991: 54 – 55) sebagai berikut:

"Implementations is carrying out of basic policy, decision usually in incorporated a state but which can also take the form of important executive orders or court decisions ideally, that decisions identifies the problems to be addressed, stipulates the objectives to be pursued and in variety of process. The process normally runs through anumber of satges beginning with passages of the basic statue, followed by the

policy output (decisions) of the implementing agencies, the compliance of decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (“Implementasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan dari suatu keputusan yang mendasar, biasanya berbentuk undang-undang (peraturan) yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dapat juga berasal dari perintah seorang eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Keputusan ini untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi pusat perhatian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai dan berbagai cara penyusunan proses implementasi. Proses ini pada permulaan biasanya menghabiskan sejumlah pernyataan dari uraian dari undang-undang dengan diikuti dengan pelaksanaan dari hasil kebijaksanaan (keputusan), pemenuhan tujuan kelompok berdasar keputusan yang telah ditentukan, hasil nyata antara yang diharapkan, pengaruh dari keputusan, dan yang terakhir adalah perbaikan-perbaikan yang penting (atau usaha-usaha untuk memperbaiki) dari peraturan dasar tersebut”).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah ditetapkan.

Selain definisi implementasi, hal yang perlu mendapat perhatian adalah bilamana implementasi dinilai berhasil. Terhadap keberhasilan implementasi pun tidak ada kriteria yang berlaku mutlak dan umum, sebab pada situasi dan kondisi tertentu ada kemungkinan tidak berlaku. Menurut Nakamura (dalam Nakamura, 1980: 146 – 151) merekomendasikan 5 kriteria

keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang dapat diukur dari hasilnya, meliputi :

1. Pencapaian tujuan kebijakan atau hasil akhir.
2. Efisiensi
3. Kepuasan kelompok sasaran
4. Daya tangkap klien
5. Sistem pemeliharaan

Dalam kenyataannya dikatakan, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari hasilnya. Asumsinya adalah bahwa kebijakan itu dibuat untuk mendapatkan hasil yang dapat diukur dan diamati. Efisiensi dipakai untuk menilai apakah kualitas suatu kinerja (*performance*) yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu apakah kelompok sasaran sudah puas atau belum merupakan hal yang patut mendapat perhatian tersendiri. Kriteria daya tanggap lebih menekankan pada analisis tentang “siapa mendapatkan apa” dari suatu organisasi. Sistem pemeliharaan mensyaratkan adanya pemeliharaan yang tidak hanya pada keberlangsungan kebijakan itu tetapi juga pada hasil yang telah dicapai.

Sedangkan kebijakan (*policy*) mempunyai arti bermacam-macam. Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan (dalam Islami, 1994: 15 – 17) memberi arti kebijakan sebagai berikut :

“a projected program of goals, values and practices” (“suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah”)

Menurut Carl J. Fredrick (Islami, 1994: 17) kebijakan adalah:

“...a proposed course of action of person, group or government within a given environment providing obstacles and oportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach goal or realize an objective or an purpose.” (“...tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan (dalam Islami, 1994: 17)

Menurut Meter dan Horn, Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan. (dalam Wibawa, 1994: 15)

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu.

Suatu program untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan yang ditentukan, dipengaruhi oleh banyak faktor dalam pelaksanaanya. Berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi kinerja suatu program akan nampak dalam model-model implementasi yang ada.

Di bawah disajikan model-model implementasi kebijakan:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994: 19 – 21) mengemukakan enam variabel dimana memperlihatkan hubungan yang mempengaruhi kinerja atau hasil suatu kebijakan. Keenam variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana telah dilaksanakannya dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya.

b. Sumber Daya

Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana maupun insentif lain, yang kemungkinan bisa mendorong terlaksananya implementasi secara efektif.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi di dalam dan antar organisasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Keberhasilan implementasi akan dapat ditingkatkan melalui kejelasan standar dan sasaran ketika dikomunikasikan, juga dengan mekanisme dan prosedur yang bisa membuat pelaksana bertindak sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan.

d. Karakteristik Birokrasi Pelaksana

Karakteristik yang bisa disebut antara lain: kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan serta kebebasan komunikasi dan keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan.

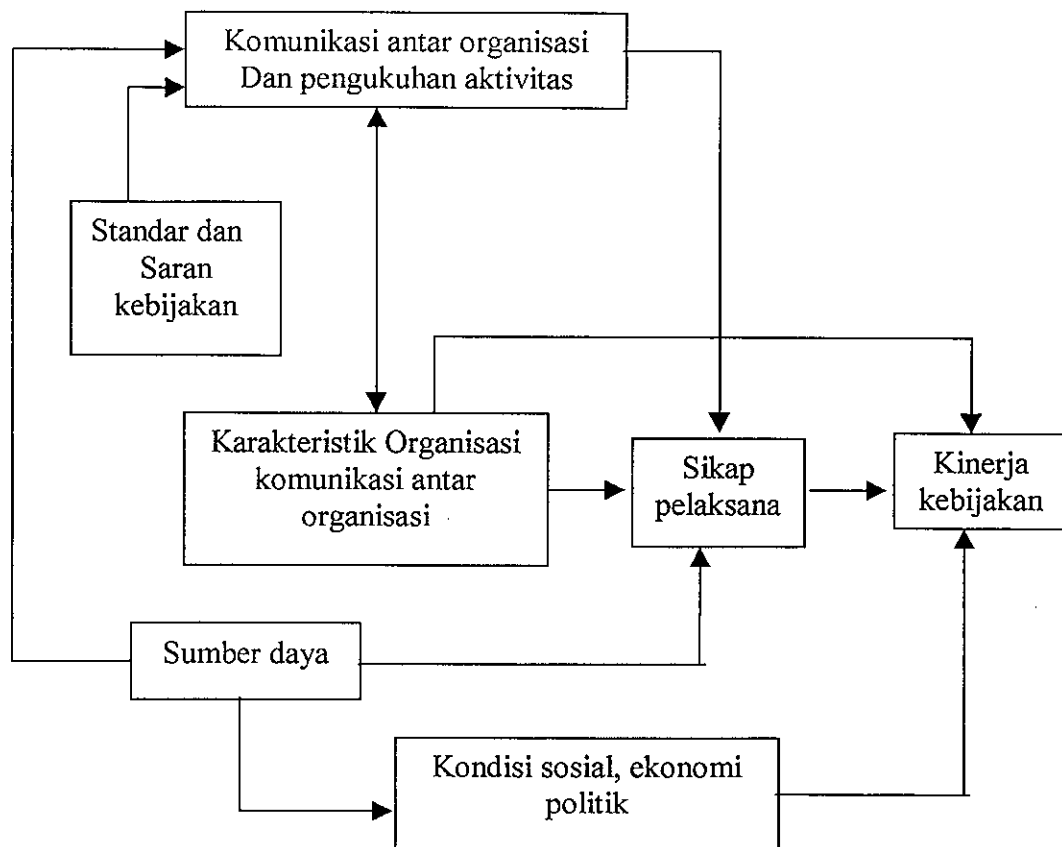
e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal ini didasarkan pada beberapa pertanyaan, misalnya: Apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki mendukung keberhasilan implementasi? Bagaimana keadaan sosial ekonomi dari masyarakat yang dipengaruhi kebijakan?

f. Sikap Pelaksana

Sikap individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap keterkaitan antar variabel tersebut. Wujud respons pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.

Gambar II. 4. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

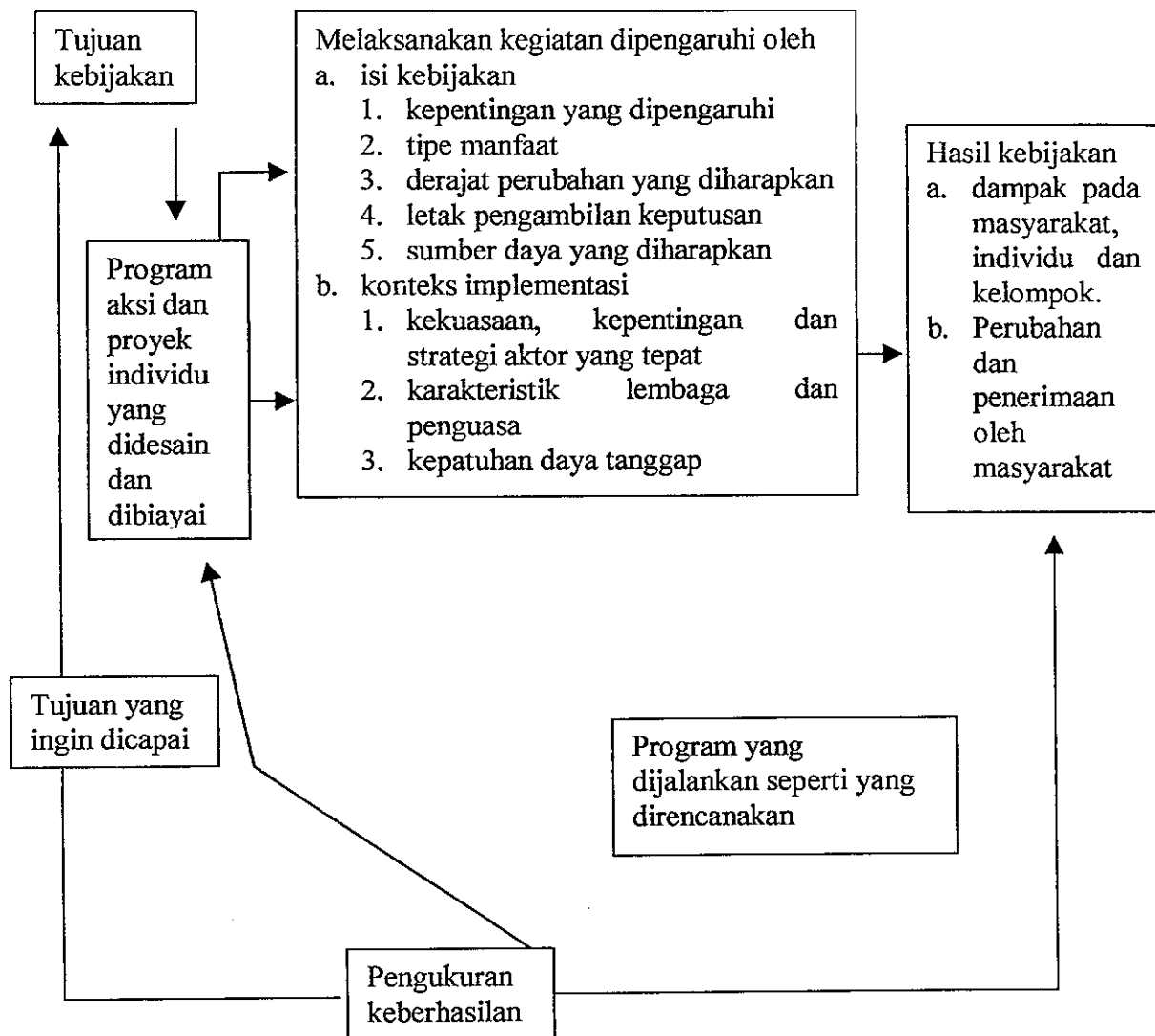


(Sumber: Wibawa, 1994: 19)

2. Model dari Grindle

Grindle dalam buku Wibawa (1994: 22) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Gambar II. 4. Model implementasi kebijakan menurut Grindle



(Sumber : Wibawa, 1994; 23)

Ide dasar Grindle adalah setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementability dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

a. Isi Kebijakan, mencakup

1) Kepentingan yang dipengaruhi

Dampak yang timbul dari suatu kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Manakala kebijakan menginginkan perubahan maka kemungkinan akan terjadi pertentangan dari kelompok yang kepentingannya merasa terancam.

2) Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual kepada banyak pelaku lebih mudah untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kurang bermanfaat.

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diinginkan oleh kebijakan berkaitan dengan manfaat kebijakan tersebut. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan.

4) Kedudukan pembuat kebijakan

Posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya. Semakin banyak unit yang terlibat dalam pembuatan keputusan akan mempersulit pelaksanaan kebijakan.

5) Pelaksana program

Semakin banyak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan maka akan mempersulit koordinasi diantara instansi-instansi tersebut.

6) Sumber daya yang dilibatkan

UPT-PUSTAK-UNDIP

Sumber daya yang dimaksudkan adalah semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program, seperti keuangan, administrasi dan sebagainya.

b. Konteks Kebijakan, mencakup :

1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Implementasi pada umumnya melibatkan banyak aktor dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non pemerintahan yang memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin saja berbeda.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Apa yang diimplementasikan sebenarnya adalah hasil dari perhitungan berbagai kelompok yang berkompetisi memperebutkan sumber daya yang terbatas, yang kesemua interaksi terjadi dalam konteks suatu lembaga.

3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Pelaksana program biasanya diharapkan mengetahui ketentuan dalam suatu kebijakan dan melakukan penyesuaian sebagai respons terhadap keinginan kelompok sasaran.

3. Model dari Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam buku Wibawa (1994: 25) menyatakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu:

a. Karakteristik Masalah

Dalam implementasi program akan dijumpai karakteristik masalah yang bisa terdiri dari empat variabel yaitu bagaimana ketersediaan teknologi dan

teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat dari populasi dan derajat perubahan.

b. Daya Dukung Peraturan

Implementasi akan efektif bila pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan yang ditetapkan. Aturan-aturan yang disarankan yaitu : kejelasan atau konsistensi tujuan yang merupakan standar evaluasi dan saran legal bagi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan, integrasi organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana dan akses formal pelaksana keorganisasian lain sebagai suatu bentuk koordinasi.

c. Variabel Non Pemerintah

Dalam implementasi juga memerlukan variabel lain di luar peraturan seperti kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan serta komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

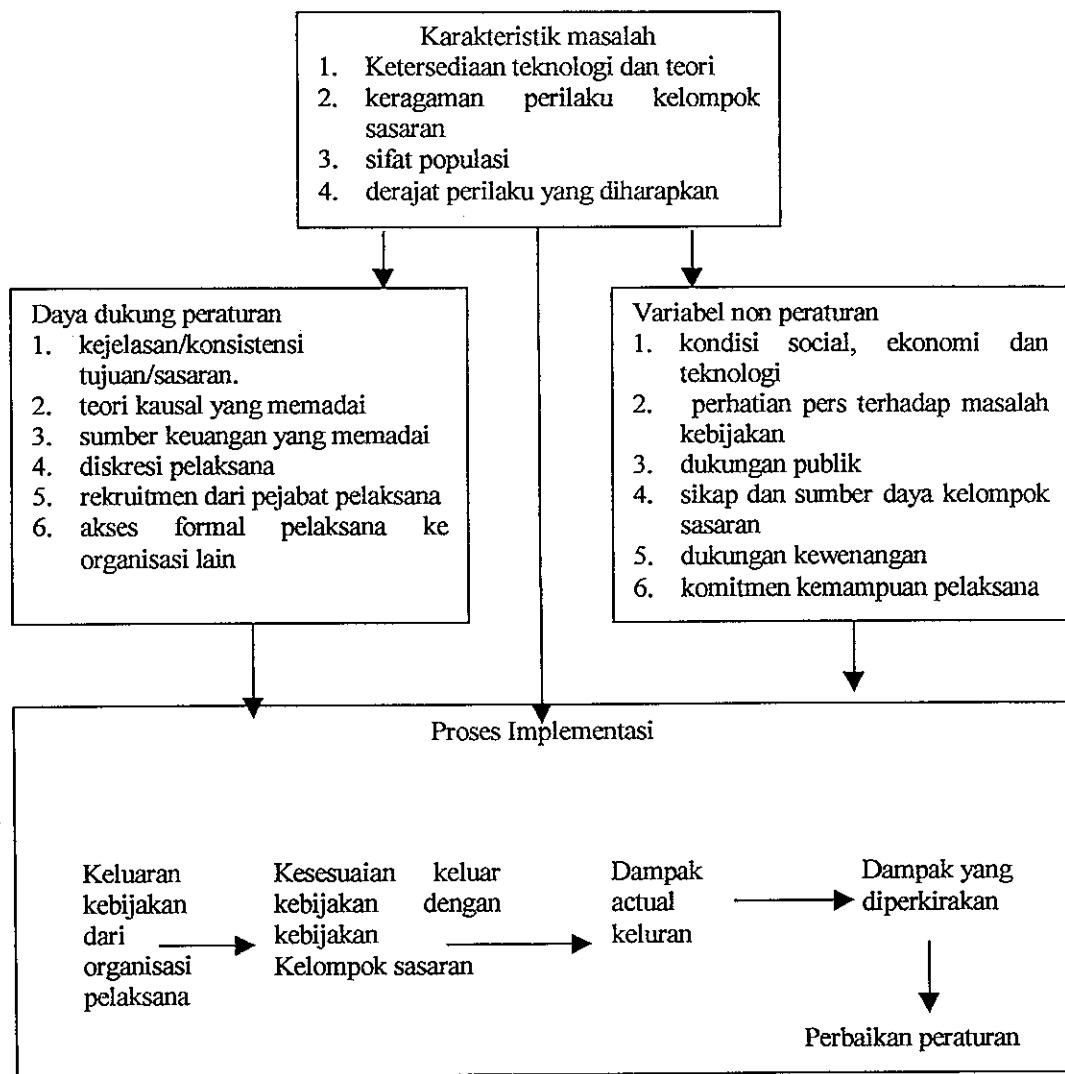
d. Proses Implementasi

Implementasi adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan dimana masing-masing tahapan itu juga merupakan input bagi keberhasilan tahap yang lain. Tahap tersebut yaitu : keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana, kesuaian keluaran dengan kelompok sasaran, dampak aktual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan dan perbaikan peraturan.

Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.

Adapun model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II. 5. Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier



(Sumber wibawa, 1994: 26)

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga variabel dependent :

- 1) Kondisi lingkungan (X1)
- 2) Komunikasi (X2)
- 3) Perilaku Pelaksana (X3)

Pada penelitian ini secara garis besar dapat diringkas teori-teori yang mendasari dalam bentuk taksonomi sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1. Taksonomi teori-teori yang mendasari penelitian

Van Mater & Van Horn	Edward III	Grindle	Masmanian & Sabatier
♦ Komunikasi	♦ Komunikasi	♦	♦ Komunikasi (Daya dukung Peraturan)
♦ Sumber-sumber (resources)	♦ Sumber-sumber	♦	♦ Sumber-sumber
♦ Karakteristik Badan Pelaksana	♦ Struktur Birokrasi	♦ -	♦ -
♦ Kecenderungan Pelaksana (sikap pelaksana)	♦ Sikap Pelaksana	♦	♦ Pelaksana
♦ Kondisi sosial (Ekonomi, sosial, dan Politik)	♦ -	♦ -	♦ Kondisi Lingkungan (Sosial, Ekonomi, Politik)
♦ -	♦ -	♦ Content	♦ -
♦ -	♦ -	♦ Conteks	♦ -

2. Kondisi Lingkungan (Variabel X1)

Menurut Van Mater dan Van Horn, salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah variabel kondisi lingkungan yang terdiri dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi

lingkungan dalam konteks kebijakan memiliki kondisi tertentu dimana kondisi atau keadaan di sekitar lingkungan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

Karena keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik, Van Mater dan Van Horn mengusulkan beberapa pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan seperti diantaranya :

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil ?
2. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan. ?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan. ?
4. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana, apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan ?
6. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan ? (Budi Winarno, 117)

Menurut Grindle (1980) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu content dan context dari kebijakan.

Konten kebijakan terdiri dari :

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi
- b. Jenis dan manfaat yang dapat diperoleh
- c. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan
- d. Kedudukan pengambilan keputusan
- e. Sumber-sumber yang tersedia.

Sedangkan konteks kebijakan memiliki dasar yaitu :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan
- b. Karakteristik rezim (walikota) dan lembaga DPRD, birokrasi pemerintah akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
- c. Kesadaran dan ketanggapan

Kesadaran dan ketanggapan dari pengambil keputusan dalam menangani dampak yang ada dari suatu kebijakan akan mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan dalam mengkaji implementasi kebijakan Edward III mengajukan dua pertanyaan yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Dan hambatan-hambatan apa yang mengakibatkan implementasi gagal. Selanjutnya Edward III berusaha menjawab 2 pertanyaan penting tersebut dengan memberikan 4 variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, struktur birokrasi.

3. Komunikasi (Variabel X2)

Kata Komunikasi berasal dari kata latin *communis* yang berarti “sama”, komunikasi akan berhasil dan efektif apabila adanya kesamaan hasil pemahaman antar komunikator dan penerima atau bila komunikator dapat menyampaikan pengertian yang dimaksud kepada penerima pesan.

Apabila kita melihat apa yang terjadi pada saat seseorang terlibat dalam komunikasi, akan ditemukan dua tindakan yang terjadi yaitu penciptaan pesan atau penciptaan pertunjukan dan penafsiran pertunjukan.

Pertunjukan pesan disebutkan Random House Dictionary of the English Language (1987) menyatakan bahwa “*to display*” secara harfiah berarti menyebarkan sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terlihat secara lengkap dan menyenangkan (R.Wayne Pace dan Don F. Faules, 27 : 1993).

Penafsiran pertunjukan pesan (*to interpret*) berarti menguraikan atau memahami sesuatu dengan suatu cara tertentu. Komunikasi akan melibatkan proses mental memahami orang, objek dan peristiwa yang kita sebut pertunjukan pesan. (R.Wayne Pace dan Don F. Faules, 27 : 1993). Dan satu-satunya pesat yang penting dalam berkomunikasi adalah pesan yang berasal dari proses penafsiran (Redding & Sanborn dalam R.Wayne Pace dan Don F. Faules, 28 : 1993)

Dalam organisasi ditemukan komunikasi organisasi yang dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi yang terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarkis

antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan .
(R.Wayne Pace dan Don F. Faules, 31 : 1993).

R.Wayne Pace dan Don F. Faules juga mendefinisikan komunikasi organisasi secara interpretatif karena komunikasi organisasi dipandang sebagai suatu perspektif interpretatif (subjektif). Definisi komunikasi organisasi menurut R.Wayne Pace dan Don F. Faules adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi.

Adapun Gibson, Ivancevich dan Donnelly mendefinisikan komunikasi sebagai pengalihan informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol-simbol umum. Sehingga pengalihan informasi bisa mengalir ke atas ke bawah (vertikal), menyilang (horisontal), dan ke bawah serta menyilang (diagonal).

Sedangkan Stephen P. Robbins memberi definisi komunikasi sebagai penstransferan dan pemahaman makna. (Stephen P. Robin, 5 : 1996).

Menurut Edward III yang dimaksud dengan komunikasi dalam kebijakan adalah bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah itu dapat diikuti harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana (Budi Winarno, 2002 : 127).

Selanjutnya Edward III membahas 3 aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Aspek pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan jelas sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya baik secara sengaja atau tidak sengaja. (Budi Winarno, 2002, 126-127)

Lebih dari itu jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Dengan demikian yang dimaksud komunikasi dalam penelitian ini adalah suatu proses yang meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu

organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya melalui aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan.

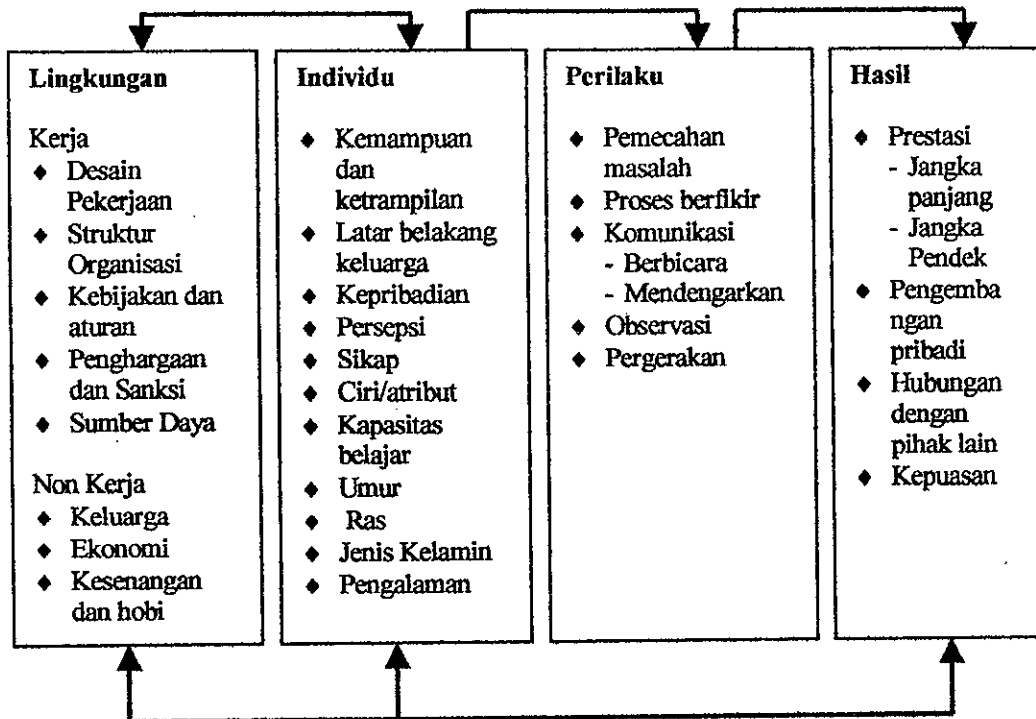
4. Perilaku Pelaksana (Variabel X3)

Gibson mendefinisikan perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang, seperti membaca, berbicara, mendengarkan dan lain-lain. Untuk memperjelas pengertian perilaku dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perilaku adalah akibat
- b. Perilaku diarahkan oleh tujuan
- c. Perilaku dimotivasi atau didorong
- d. Perilaku yang tidak secara langsung (misalnya, berfikir dan mengawasi) juga penting dalam mencapai tujuan.
- e. Perilaku yang bisa diamati dapat diukur (Gibson, 1997 : 125-126)

Pengertian perilaku dalam konteks kebijakan adalah perilaku individu dalam lingkungan kebijakan. Perilaku dalam lingkungan kebijakan pada hakekatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu pelaku kebijakan dalam lingkungan organisasinya. (Thoha, 2000). Masing-masing individu tersebut membawa karakteristik yang berbeda-beda dalam lingkungan organisasinya sehingga membawa pengaruh ke lingkungan organisasinya (Gibson, 1996). Untuk mengetahui lebih jelas perilaku yang dilakukan seseorang Gibson menggambarkan perilaku yang tergantung dari jenis-jenis variabel seperti dibawah ini :

Gambar II.6 Kerangka Perilaku Individu



Sumber : Gibson, h. 124

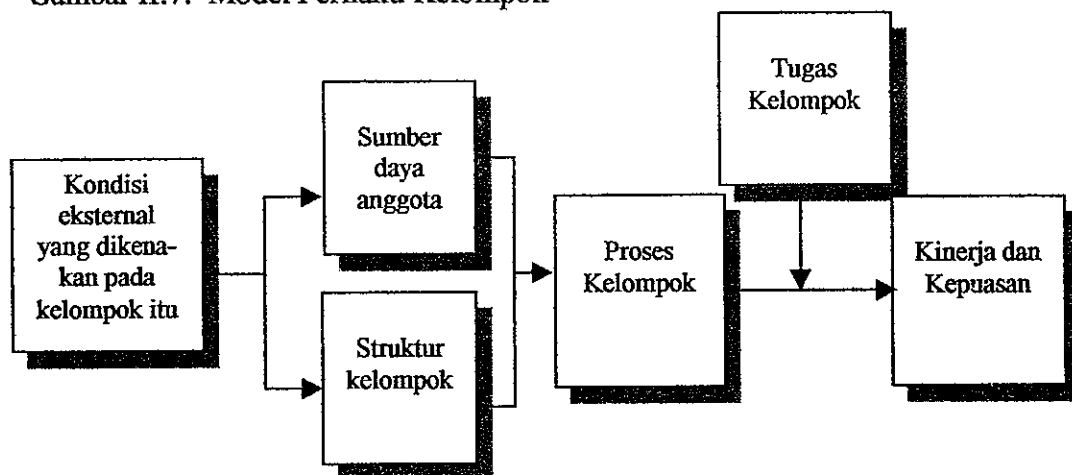
Menurut Miftah Thoha, perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, atau dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut $P = F(I, L)$, dimana P adalah Perilaku, F adalah Fungsi, I adalah Individu, L adalah lingkungan. Ini berarti bahwa seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. (Miftah Thoha, 2000 : 30)

Tetapi apabila lingkungan atau organisasi dari masing-masing individu tersebut mempunyai karakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan, tanggungjawab, hak dan kewajiban maka karakteristik lingkungan atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan perilaku masing-masing individu (Thoha, 2000). Masing-masing individu tersebut membawa

karakteristik yang berbeda-beda dalam lingkungan organisasinya sehingga membawa pengaruh ke lingkungan organisasinya (Gibson, 1996). Namun apabila lingkungan atau organisasi dari masing-masing individu tersebut mempunyai karakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan dalam bentuk seperti peraturan, tanggungjawab, hak dan kewajiban maka karakteristik lingkungan atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan perilaku masing-masing individu (Thoha, 2000).

Adapun perilaku pelaksana dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku kelompok pelaksana kebijakan. Robin menjelaskan perilaku kelompok dipengaruhi beberapa variabel untuk mendapatkan keberhasilan kelompok. Variabel-variabel tersebut adalah : kemampuan anggota kelompok, ukuran kelompok, tingkat konflik, tekanan internal. (Stephen P. Robin, 1996 :280) Digambarkan Robin sebagai berikut:

Gambar II.7. Model Perilaku Kelompok



Sumber : Stephen Robin, 1996: hal. 280

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan, pelaksana berarti pelaku (orang, panitia, organisasi) yang mengerjakan rancangan, rencana atau kebijakan. (KBBI, 1989)

Selanjutnya yang dimaksud Perilaku Pelaksana dalam penelitian ini adalah suatu hasil dari interaksi pelaksana kebijakan terhadap objek kebijakan.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Widodo (2000) dalam tesisnya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL (studi kasus Kecamatan Semarang Tengah) disebutkan bahwa penelitian tersebut merekomendasikan tentang perlunya penelitian lanjutan mengenai PKL secara komprehensif. Dengan berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penelitian kali ini akan membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan).

Penelitian yang dilakukan oleh Okki Navarone (2003) dalam tesisnya yang berjudul Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11 Tahun 2002 Di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian tersebut menyimpulkan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap Perda No. 11 Tahun 2002 yang menjadi tonggak terhadap pemahaman PKL dan warga kota Semarang dalam mendukung segala peraturan dan kebijakan. Dengan demikian tujuan dari kebijakan tersebut akhirnya dapat dicapai dengan baik. Penelitian tersebut juga merekomendasikan pentingnya penelitian yang akan datang dan penelitian yang lebih lanjut mengenai kebijakan sosialisasi dan pemberdayaan PKL di kota Semarang.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Hipotesis 1, (H₁):

Ada pengaruh yang signifikan antara Kondisi lingkungan di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi Perda No. 8 Tahun 1995.

2. Hipotesis 2, (H₂):

Ada pengaruh yang signifikan antara Komunikasi terhadap keberhasilan implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan.

3. Hipotesis 3, (H₃):

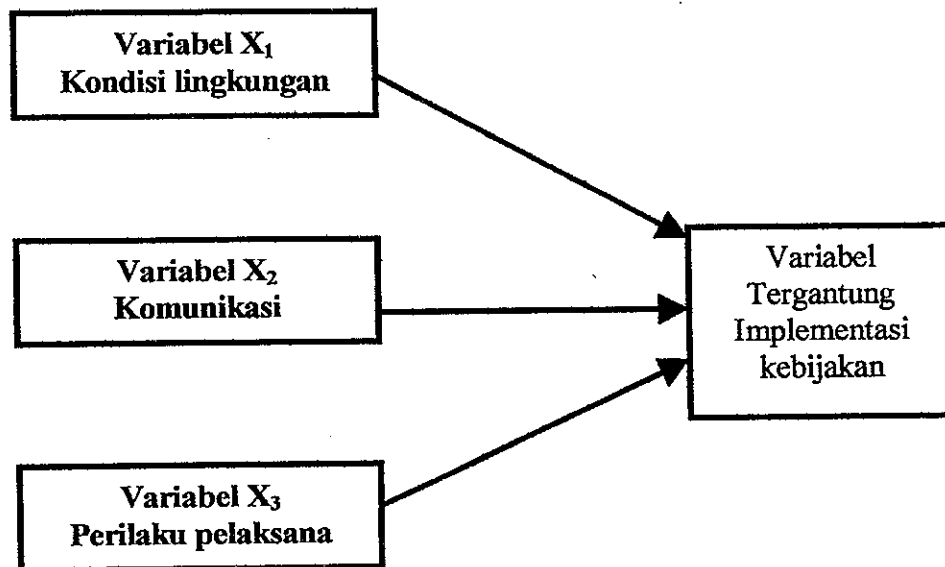
Ada pengaruh yang signifikan antara Perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.

4. Hipotesis 4, (H₄):

Ada pengaruh yang signifikan antara Kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.

Gambar II. 8

GEOMETRICAL MODEL HIPOTESIS



Keterangan :

Variabel bebas I (X₁) : Kondisi Lingkungan

Variabel bebas II X₂ : Komunikasi

Variabel bebas III (X₃) : Perilaku Pelaksana

Variabel Tergantung Y : Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal (Ferdinand, 2002, p. 25) yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kausal adalah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel, mencari tipe sesungguhnya dari fakta untuk membantu memahami dan memprediksi hubungan, menetapkan pendekatan kausal dari kejadian-kejadian yang berurutan, dan mengukur variasi antara penyebab yang diduga dan akibat yang diduga. Tujuan penelitian kausal adalah untuk mengembangkan model hipotesis-hipotesis yang ada. Sehingga dari model penelitian yang dikembangkan ini, diharapkan dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel yang bertujuan memberikan kegunaan dalam bidang kebijakan publik. Dengan demikian, apabila hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis, maka penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian penjelasan (*explanatory research*) (Singarimbun, 1995, p. 5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyangkut aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan Kota di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Karena kesimpulan data sampel digunakan untuk mengambil kesimpulan populasi, maka penentuan sampel perlu dilakukan. Populasi penelitian ini

mengambil sampel warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di daerah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini masih dalam cakupan ilmu administrasi publik dengan fokus penelitian kepada analisis terhadap implementasi kebijakan Perda Pemerintah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang penanganan penataan PKL. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi :

1. Kondisi Lingkungan (X_1)
2. Komunikasi (X_2)
3. Perilaku Pelaksana (X_3)

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta dilakukan di wilayah Kecamatan Laweyan.

Alasan Kecamatan Laweyan dipilih sebagai lokasi penelitian adalah

1. Kecamatan Laweyan merupakan wilayah yang strategis bagi PKL di Surakarta.
2. Bila dilihat dari jenis usaha, jenis tempat usaha dan waktu operasional PKL, maka karakteristik tersebut cukup representatif dalam mewakili penelitian ini
3. Tersedianya data PKL yang diperlukan dalam penelitian.
4. Terdapatnya sentra kegiatan kota dan sebagai pusat kegiatan publik yang vital.

5. Kecamatan Laweyan sebagai pintu gerbang di sebelah barat kota Surakarta.

D. VARIABEL PENELITIAN

1. Klasifikasi Variabel

- a. Variabel bebas (X)
 - Kondisi lingkungan (X_1)
 - Komunikasi (X_2)
 - Perilaku pelaksana (X_3)

- b. Variabel tergantung

Implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta.

2. Definisi Konseptual :

Definisi konseptual masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
- b. Kondisi Lingkungan adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan masyarakat lokasi implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.
- c. Komunikasi suatu proses yang meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya melalui aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan.
- d. Perilaku Pelaksana adalah suatu hasil dari interaksi pelaksana kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima di Surakarta terhadap objek kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Definisi Operasional

Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi dalam penelitian adalah definisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian maka dapat diketahui pengukuran baik buruknya suatu variabel .

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

a. Implementasi Kebijakan dengan menggunakan indikator :

- 1) Tingkat keberhasilan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- 2) Tingkat keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima
- 3) Tingkat keberhasilan penertiban Pedagang Kaki Lima
- 4) Tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan
- 5) Tingkat keberhasilan kegiatan pembimbingan
- 6) Tingkat keberhasilan kegiatan memfasilitasi program kemitraan
- 7) Tingkat keberhasilan kegiatan inventarisasi masalah-masalah untuk pemecahan masalah.
- 8) Tingkat keberhasilan kegiatan mendesain dasaran PKL
- 9) Tingkat keberhasilan kegiatan penempatan zona PKL
- 10) Tingkat keberhasilan kegiatan memungut retribusi PKL
- 11) Tingkat keberhasilan kegiatan menindak pelanggaran kebijakan.

b. Kondisi Lingkungan PKL dapat diindikasikan dengan :

- 1) Tingkat kebersihan lingkungan PKL
- 2) Tingkat keindahan lingkungan PKL

- 3) Tingkat ketertiban dan keamanan lingkungan
- 4) Tingkat kelestarian lingkungan kota
- 5) Tingkat keramaian lingkungan
- 6) Tingkat kerawanan lalu lintas
- 7) Tingkat kerawanan kejahatan
- 8) Tingkat keramahan warga.

c. Komunikasi dengan menggunakan indikator :

- 1) Tingkat pemahaman terhadap keputusan kebijakan.
- 2) Tingkat keakuratan dan kecermatan keputusan kebijakan sebelum implementasi kebijakan.
- 3) Tingkat kemampuan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Tingkat kesesuaian kebijakan dengan implementasi kebijakan
- 5) Tingkat pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan kebijakan
- 6) Tingkat kejelasan tujuan kebijakan.

d. Perilaku Pelaksana dengan menggunakan indikator :

- 1) Tingkat dukungan pelaksana terhadap kebijakan
- 2) Tingkat tanggungjawab pelaksana terhadap kebijaksanaan
- 3) Tingkat pelaksanaan kewajiban pelaksana pada saat implementasi kebijakan.
- 4) Tingkat kewenangan pelaksana pada saat implementasi kebijakan.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang dipergunakan pada analisis data adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer berasal dari Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta dan Kantor Kecamatan Laweyan yang antara lain terdiri dari data jumlah PKL, hasil pengamatan langsung, jumlah penduduk, tingkat penghasilan rata-rata, dan data-data lain yang menyangkut PKL.
2. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, serta berbagai sumber relevan lain seperti Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Surakarta 2002 kepada DPRD Kota Surakarta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala ordinal. Kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian utama dengan menggunakan pertanyaan secara terstruktur baik dengan metode tertutup maupun secara terbuka. Instrumen penelitian ini mempunyai suatu pedoman atau tata cara sebagai petunjuk dalam mengajukan pertanyaan yang akan diajukan yang akan dinilai dengan suatu skor.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala ordinal dari Likert dengan catatan :

“Semakin tinggi nilai atau score merupakan indikasi sikap positif sedangkan nilai yang rendah menunjukkan sebaliknya”.

Skala pengukuran Likert tersebut bertujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan pada jenjang ordinal menggunakan seperangkat indikator. Jadi skala pengukuran merupakan kegiatan pemberian nilai atau score yang merupakan angka pada jawaban atas pertanyaan oleh responden untuk mendapatkan data

yang diperlukan dalam pengujian hipotesa. Dengan demikian penilaian instrumen itu akan dapat menghasilkan total score bagi setiap responden.

Dalam memberikan penilaian terhadap jawaban penilaian dalam jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk jawaban tidak mendukung/tidak setuju
2. Nilai 2 untuk jawaban kurang mendukung/kurang setuju
3. Nilai 3 untuk jawaban mendukung/setuju
4. Nilai 4 untuk jawaban sangat mendukung/setuju.

G. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang berjumlah 708, yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat populasi yang diteliti jumlahnya begitu besar dan tersebar di beberapa tempat keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka dalam memperoleh data untuk penelitian ini digunakan suatu cara sampling.

Ada berbagai rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk menentukan besarnya sampel dengan menggunakan table dan Nomogram. Tabel yang digunakan adalah table Krejcie dan Nomogram Hary King. Dengan cara tersebut penulis tidak mempergunakan perhitungan yang rumit. (Sugiyono, h. 64). Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran

sampel didasarkan atas kesalahan 5 % jadi sampel yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95 % terhadap populasi.

Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasi di Kecamatan Laweyan adalah 708 PKL. Bila tingkat kesalahan 5 % maka jumlah sampelnya sebanyak 240 PKL. (Tabel Krejcie, Sugiyono hal. 65).

Karena populasi dalam penelitian ini bersrata maka jumlah sampelnya juga harus bersrata menurut jumlah PKL ditiap-tiap Kelurahan harus proporsional sesuai dengan populasi.

Jumlah PKL di kecamatan Laweyan ditiap-tiap Kelurahan menurut data dari Direktori Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta tahun 2002 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel :

Tabel III.1

Jumlah PKL ditiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

No	Kelurahan	Jumlah PKL
1	Pajang	104
2	Laweyan	7
3	Bumi	39
4	Panularan	39
5	Penumping	87
6	Sriwedari	96
7	Purwosari	91
8	Sondakan	75
9	Kerten	73
10	Jajar	61
11	Karangasem	35
	Jumlah	708

Tabel III. 2

Penentuan Jumlah Sampel PKL

No	Kelurahan	Sampel Yang Diambil
1	Pajang	$104 / 708 \times 240 = 35,25 = 35$
2	Laweyan	$7 / 708 \times 240 = 2,37 = 2$
3	Bumi	$39 / 708 \times 240 = 13,22 = 13$
4	Panularan	$39 / 708 \times 240 = 13,22 = 13$
5	Penumping	$87 / 708 \times 240 = 29,49 = 29$
6	Sriwedari	$96 / 708 \times 240 = 32,25 = 32$
7	Purwosari	$91 / 708 \times 240 = 32,54 = 33$
8	Sondakan	$75 / 708 \times 240 = 25,42 = 25$
9	Kerten	$74 / 708 \times 240 = 25,08 = 25$
10	Jajar	$61 / 708 \times 240 = 20,67 = 21$
11	Karangasem	$35 / 708 \times 240 = 11,52 = 12$
Jumlah Semua Sampel		240 PKL

Jadi jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 240 PKL, dengan catatan yang terdapat dibelakang koma dibulatkan keatas $> 0,5$ dan dibulatkan kebawah $< 0,5$.

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk dijawab dengan cermat dan teliti.

2. Interview Guide/Wawancara langsung dengan beberapa pertanyaan dengan instrumen kuesioner.
3. Pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh beberapa informasi sesuai dengan kenyataan.

I. TEKNIK ANALISIS DATA

Berbagai data yang telah diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode :

1. Analisis Kualitatif

Salah satu metode atau teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan berbagai variabel dengan metode kualitatif dengan penjabaran uraian. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. (Sugiyono, 2002, p. 12)

2. Analisis data kuantitatif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis berdasarkan distribusi data.

Kedua analisis digunakan karena dalam penelitian tidak semua data dapat dijabarkan dan dihitung dengan angka angka saja tetapi dibutuhkan data yang

lebih mendalam (*indepth*) karena kebenaran tidak hanya terlihat pada yang nampak, sehingga memungkinkan didapatkan hasil yang akurat.

Adapun Uji hipotesis yang dipakai adalah :

- a. Teknik Korelasi *Product Moment*, dengan maksud untuk menguji hubungan dua variabel yaitu apakah ada hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X3 dan Y, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{XY} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

- R_{XY} = Koefisien korelasi x dan y
 $\sum xy$ = Jumlah hasil perkalian x dan y
 $\sum x^2$ = Jumlah x setelah dikuadratkan
 $\sum y^2$ = Jumlah y setelah dikuadratkan

- b. Koefisien ganda (*Multivariat*), digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan derajat asosiasi atau tingkat hubungan semua variabel bebas dengan variabel terikat, yakni hubungan kondisi lingkungan (X1), komunikasi (X2), perilaku pelaksana (X3), terhadap peningkatan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan (Y) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{X_1 X_2 X_3 Y} = \frac{\sqrt{r^2 X_1 Y + r^2 X_2 Y + r^2 X_3 Y - 3 r X_1 Y \cdot r X_2 Y \cdot r X_3 Y - r X_1 X_2 X_3}}{1 - r^2 X_1 X_2 X_3}$$

Keterangan =

$R_{X_1X_2X_3Y}$ = Koefisien korelasi antara X_1 , X_2 dan X_3 secara bersama-sama dengan Y .

$r^2_{X_1Y}$ = Koefisien korelasi antara X_1 dan Y

$r^2_{X_2Y}$ = Koefisien korelasi antara X_2 dan Y

$r^2_{X_3Y}$ = Koefisien korelasi antara X_3 dan Y

$r_{X_1X_2X_3}$ = Koefisien korelasi antara X_1 , X_2 , dan X_3 ,

c. Regresi

Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada variabel tergantung (Y) dan variabel bebas (X), dalam penelitian ini terdiri dari variabel tergantung adalah implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, variabel bebas pertama (X_1) adalah kondisi lingkungan, variabel bebas kedua (X_2) adalah komunikasi, dan variabel bebas ketiga adalah perilaku pelaksana.

Untuk menghitung prediksi hubungan antara variabel tergantung dengan satu variabel bebas digunakan regresi sederhana (*Simple Regresision*), sedangkan untuk menghitung variabel tergantung dengan lebih dari satu variabel digunakan regresi berganda (*Multiple Regression*).

Adapun untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dari para responden akan dipergunakan alat bantu pengolahan data dengan SPSS (*Statistical Product dan Service Solutions*). Dengan tujuan pemanfaatan metode pengolahan tersebut dapat mempersingkat waktu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1. Deskripsi responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu pedagang yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada suatu tempat umum yang sebenarnya dimaksudkan bukan untuk kegiatan usaha seperti ditrotoar jalan, di taman kota, dan sebagainya (Direktori PKL, 2002) di wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta. Menurut hasil pendataan PKL yang dilakukan Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta yang tercatat pada buku Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta 2002, menyebutkan bahwa jumlah seluruh usaha PKL yang dapat tercakup dalam pendataan tersebut sebanyak 3390 yang tersebar di 5 (lima) kecamatan sebagai berikut : 708 usaha di Kecamatan Laweyan, 519 usaha di Kecamatan Serengan, 426 di Kecamatan Pasar Kliwon, 501 di Kecamatan Jebres, dan 1236 usaha di Kecamatan Banjarsari. Responden dalam penelitian ini meliputi semua jenis usaha, jenis tempat usaha, waktu operasional usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kecamatan Laweyan Surakarta terdiri dari 11 kelurahan yaitu Kelurahan Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Sondakan, Kerten, Jajar, Karangasem. Seperti pada Penentuan Jumlah Sampel bahwa dari 708 populasi ditentukan menjadi 240 PKL pada Tabel III. 2.

Karena populasi masing-masing kelurahan berbeda maka besarnya responden juga mengalami perbedaan. Untuk penentuan responden yang akan

diberi daftar pertanyaan pada populasi, maka peneliti melakukan undian tiap-tiap populasi PKL dari 11 (sebelas) kelurahan sehingga didapatkan 248 responden.

Setelah didapatkan daftar responden, maka peneliti memberikan daftar pertanyaan pada 240 responden seperti daftar responden yang ada. Setelah diperkirakan waktu yang cukup untuk mengisi daftar pertanyaan, maka peneliti mengambil daftar pertanyaan. Dari 240 daftar pertanyaan yang disampaikan pada responden, yang mengembalikan sebanyak 240 responden (100 %).

Setelah diketahui gambaran responden, maka selanjutnya akan di analisa jawaban dari 240 responden yang telah mengisi dan menyerahkan daftar pertanyaan kepada penulis. Deskripsi ini menyajikan hasil kuesioner dari responden PKL Kecamatan Laweyan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi tiap-tiap indikator, untuk mengetahui persentase tanggapan PKL terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan, pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya skor penilaian dari masing-masing variabel, maka diperlukan kriteria interval atas jawaban responden. Nilai interval tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana.

A.2. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 (Variabel Y)

Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan diperlukan maksud dari implementasi kebijakan itu sendiri, yang dimaksud implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang

atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi digunakan cara membandingkan antara data empiris dengan data teoritis. Data empiris adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan seperti pada jumlah data dari responden. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dilakukan dengan pemberian nilai pada indikator pembinaan, penataan, penertiban, penyuluhan, kemitraan, inventarisasi masalah, desain dasaran, dan penempatan zona. Penilaian menggunakan skala likert terhadap jawaban responden pada daftar pertanyaan implementasi kebijakan yang terdiri dari 32 item pertanyaan, dengan empat alternatif jawaban dan dinilai dengan empat tingkatan yaitu : jawaban a diberi skor 4, jawaban b diberi skor 3, jawaban c diberi skor 2, dan jawaban d diberi skor 1.

Dari hasil jawaban responden pada variabel implementasi kebijakan dari indikator pembinaan terdiri dari 6 item pertanyaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan.

Jawaban 240 responden pada nomor 1 tentang tingkat perhatian PKL terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta ditampilkan dalam tabel IV.1 menggambarkan bahwa perhatian Pedagang Kaki Lima terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan 1.3% menyatakan sangat tidak menarik perhatian, 6.3% menyatakan tidak menarik perhatian, 60.8% menyatakan menarik perhatian, dan 31.7% sangat menarik perhatian. Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa PKL cenderung menyatakan relatif menarik perhatian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan.

Tabel IV. 1. TINGKAT PERHATIAN PKL TERHADAP KEGIATAN PEMBINAAN.

No	Perhatian PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat tidak menarik perhatian	3	1.3
2.	Tidak menarik perhatian	15	6.3
3.	Cukup menarik perhatian	146	60.8
4.	Menarik perhatian	76	31.7
Jumlah		240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 1

Keberhasilan pembinaan dapat juga diukur dengan jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan, untuk itu penelitian ini menanyakan pada responden tentang jumlah kegiatan pembinaan dan didapatkan hasil sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 2. JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN PKL

No	Kegiatan Pembinaan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada	20	8.3
2.	Sedang	75	31.3
3.	Cukup	121	50.4
4.	Banyak	24	10.0
Jumlah		240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 2

Tabel di atas menggambarkan dari 240 responden, ada 8.3% responden yang menilai jumlah kegiatan pembinaan tidak ada, 31.3% menilai jumlah kegiatan pembinaan sedang, adapun yang menilai jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan cukup sebesar 50.4%, dan sebanyak 10% menyebutkan jumlah kegiatan pembinaan banyak. Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kegiatan pembinaan cenderung relatif ke arah sedang dan tidak ada kegiatan, bila dilihat dari penilai responden yang cenderung ke arah negatif.

Dalam mengukur keberhasilan pembinaan PKL diukur juga manfaat kegiatan pembinaan terhadap PKL. Didapatkan hasil penilaian responden terhadap manfaat kegiatan pembinaan PKL pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3. MANFAAT KEGIATAN PEMBINAAN PKL

No	Manfaat Kegiatan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat merugikan	4	1.7
2.	Merugikan	17	7.1
3.	Cukup menguntungkan	126	52.5
4.	Menguntungkan	93	38.8
Jumlah		240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 3

Tabel IV.3 di atas merupakan penilaian 240 responden terhadap manfaat kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Seksi Pembinaan PKL. 1.7% menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan sangat merugikan, 7.1% menilai kegiatan yang dilaksanakan merugikan PKL, tetapi 52.5% menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Seksi Pembinaan cukup menguntungkan, dan 38.8% menilai kegiatan yang dilaksanakan menguntungkan bagi PKL.

Pada item cara pembinaan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pembinaan PKL, sehingga didapatkan penilaian terhadap cara pembinaan PKL seperti pada tabel IV.4.

Tabel IV. 4. CARA PEMBINAAN PKL

No	Cara Pembinaan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak menyenangkan	6	2.5
2.	Kurang menyenangkan	47	19.6
3.	Cukup menyenangkan	121	50.4
4.	Menyenangkan	66	27.5
Jumlah		240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 4

Dari tabel IV.4 dapat diketahui dari 240 responden, yang memberi pernyataan cara pembinaan PKL tidak menyenangkan sebanyak 2.5%, yang menyatakan kurang menyenangkan sebanyak 19.6%, 50,4% yang lain memberikan pernyataan cara pembinaan yang dilakukan Seksi Pembinaan cukup menyenangkan, adapun 27.5% menyatakan cara pembinaan yang dilakukan Seksi Pembinaan menyenangkan.

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa cara yang dilakukan Seksi Pembinaan kepada PKL relatif cukup menyenangkan meskipun masih diperlukan inovasi terhadap cara pembinaan karena terdapat yang menyebutkan 2.5% tidak menyenangkan dan 19.6% menyatakan kurang menyenangkan.

Waktu untuk pelaksanaan pembinaan PKL diperlukan perhatian bagi Seksi Pembinaan, karena perbedaan kegiatan PKL, perbedaan waktu operasional usaha. Pada item waktu pelaksanaan pembinaan didapatkan jawaban responden sebagai berikut:

Tabel IV. 5. WAKTU PELAKSANAAN PEMBINAAN PKL

No	Waktu Pembinaan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tepat	0	00.0
2.	Kurang tepat	60	25.0
3.	Tepat	124	51.7
4.	Sangat tepat	56	23.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 5

Tabel di atas dapat diinterpretasikan dari 240 responden tidak ada yang menyatakan waktu pelaksanaan pembinaan tidak tepat, 25% menyatakan kurang tepat waktu pelaksanaan pembinaan, 51,7% menyatakan cukup tepat waktunya pelaksanaan pembinaan, dan 23.3% menilai tepat waktu dengan kegiatan PKL, waktu operasional PKL.

Indikator penataan PKL terdiri dari 5 item pertanyaan diperlukan untuk mengukur keberhasilan penataan PKL dalam implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pada pelaksanaan penataan PKL didapatkan jawaban dari 240 responden yang menyebutkan tidak pernah ada pelaksanaan penataan PKL sebanyak 2.9%, yang menilai kadang-kadang dilakukan pelaksanaan pembinaan penataan PKL sebesar 59.6%, dan 20.8% menilai pelaksanaan penataan PKL sering dilaksanakan, serta terdapat 16.7% responden yang menyebutkan pelaksanaan penataan PKL selalu dilaksanakan. Untuk memudahkan penjelasan ini digambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel IV. 6. PELAKSANAAN PENATAAN PKL

No	Pelaksanaan Penataan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah	7	2.9
2.	Kadang-kadang	143	59.6
3.	Sering	50	20.8
4.	Selalu	40	16.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 6

Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketepatan cara untuk penataan PKL yang dilaksanakan oleh Seksi Penataan PKL didapat jawaban responden seperti pada tabel IV.7 dibawah ini menggambarkan bahwa 2.5% menilai cara penataan yang digunakan tidak tepat, yang menyatakan kurang tepat terhadap cara penataan sebesar 39.2%, yang menilai cara penataan tepat sebesar 38.3%, tetapi yang menyebutkan cara penataan tersebut sangat tepat sebesar 20%.

Tabel IV. 7. CARA PENATAAN PKL

No	Pelaksanaan Penataan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tepat	6	2.5
2.	Kurang tepat	94	39.2
3.	Tepat	92	38.3
4.	Sangat tepat	48	20.0
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 7

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa responden menilai cara penataan yang dilaksanakan kurang tepat karena terdapat 39.2% penilaian terbesar yang menyebutkan cara yang dilaksanakan kurang tepat.

Untuk mengetahui sifat penataan yang dilaksanakan didapatkan jawaban responden seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 8. SIFAT PENATAAN PKL

No	Pelaksanaan Penataan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak menyenangkan	9	3.8
2.	Kurang menyenangkan	58	24.2
3.	Cukup menyenangkan	118	49.2
4.	Menyenangkan	55	22.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 8

Tabel di atas dapat diartikan bahwa sifat penataan yang dilaksanakan oleh Seksi Penataan Pemerintah Kota Surakarta didapatkan jawaban dari 240 responden 3.8% menilai tidak menyenangkan, 24.2% menilai kurang menyenangkan, 49.2% menilai cukup menyenangkan, dan 22.9% menyatakan sifat penataan yang dilaksanakan menyenangkan.

Adapun untuk mendapatkan tingkat kemanfaatan penataan bagi PKL terhadap kegiatan yang dilaksanakan Seksi Penataan diperlukan penilaian PKL

terhadap kemanfaatan kegiatan. Dari 240 responden menyebutkan tingkat kemanfaatan pelaksanaan penataan tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 9. MANFAAT PELAKSANAAN PENATAAN

No	Manfaat Penataan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak bermanfaat	10	4.2
2.	Kurang bermanfaat	62	25.8
3.	Bermanfaat	108	45.0
4.	Sangat bermanfaat	60	25.0
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 9

Dari 240 responden yang menyebutkan tidak bermanfaat bagi PKL kegiatan pelaksanaan penataan sebesar 4.2%, yang menyebutkan kurang bermanfaat sebesar 25.8%, yang menyatakan kegiatan pelaksanaan penataan PKL bermanfaat sebanyak 45%, dan terdapat 25% yang menilai kegiatan pelaksanaan penataan PKL sangat bermanfaat.

Seksi Penataan juga mempunyai tugas melakukan penataan terhadap desain dasaran pada PKL, untuk itu diperlukan tanggapan responden terhadap saran dan contoh desain dasaran yang diberikan. Hal itu mendapat tanggapan dari 240 responden yang ditampilkan pada tabel IV.10 dibawah ini :

Tabel IV. 10. DESAIN PENATAAN

No	Desain Penataan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak baik	1	0.4
2.	Kurang baik	36	15.0
3.	Cukup baik	121	50.4
4.	Baik	82	34.2
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 10

Dari 240 responden hanya 0.4% yang menyebutkan desain yang disarankan dan dicontohkan Seksi Penataan kepada PKL tidak baik, yang menilai kurang baik desain penataan sebesar 15%, yang menilai cukup baik desain penataan sebesar 50.4% dan yang menilai baik desain dasaran yang disarankan dan dicontohkan Seksi Penataan kepada PKL sebanyak 34.2%. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa desain penataan yang disarankan dan dicontohkan oleh Seksi Penataan dalam kategori baik karena 50% responden menilai cukup baik dan 34.2% menyatakan baik.

Harapan program penataan Perda No. 8 Tahun 1995 adalah adanya kepatuhan anggota PKL. Untuk itu diperlukan jawaban responden tentang kepatuhannya terhadap program yang disampaikan kepada PKL. Jawaban 240 responden terhadap item ini ditampilkan pada tabel IV.11.

Dari 240 responden, didapatkan 3.3% responden yang menyatakan tidak patuh terhadap program penataan PKL, 29.3% responden menyatakan kurang patuh terhadap program penataan PKL, 34.6% menyatakan cukup patuh terhadap program penataan PKL, 32.9% menyatakan patuh terhadap program penataan PKL.

Tabel IV. 11. KEPATUHAN ANGGOTA PKL TERHADAP PROGRAM PENATAAN

No	Kepatuhan PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak patuh	8	3.3
2.	Kurang patuh	70	29.2
3.	Cukup patuh	83	34.6
4.	Patuh	79	32.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 11

Hasil di atas dapat diinterpretasikan bahwa responden yang menyatakan tidak patuh dan kurang patuh sebanyak 32.5% dan yang menyatakan cukup patuh dan patuh sebanyak 67.5%. Hal ini memang yang patuh dan cukup patuh lebih banyak dari pada yang tidak patuh dan kurang patuh, tetapi angka 32.5% cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian bagi pengambil kebijakan.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pada pelaksanaan penertiban PKL diperlukan tanggapan responden tentang pelaksanaan penertiban PKL yang terdiri dari 4 item pertanyaan dan mendapatkan tanggapan responden di bawah ini.

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan penertiban dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 12. PELAKSANAAN PENERTIBAN PKL

No	Penertiban PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah dilakukan	2	.8
2.	Kadang-kadang dilakukan	92	38.3
3.	Sering dilakukan	120	50.0
4.	Selalu dilakukan	26	10.8
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 12

Tabel di atas menggambarkan dari 240 responden yang menyatakan tidak pernah dilaksanakan penertiban sebesar 0.8%, yang menyatakan kadang-kadang dilakukan penertiban sebesar 38.3%, yang menyebutkan sering dilakukan penertiban sebesar 50% dan yang menyebutkan selalu dilakukan penertiban sebesar 10.8%.

Pada item cara penertiban PKL yang disebutkan pada item pertanyaan kedua belas mendapatkan jawaban responden seperti pada tabel IV.13. Penampilan pada tabel di bawah menggambarkan bahwa dari 240 responden cara penertiban yang dilaksanakan oleh Seksi Penertiban PKL relatif disiplin karena yang

menyebutkan tidak disiplin sebesar 1.3%, yang menyebutkan kurang disiplin sebesar 32.5%, yang menyebutkan cukup disiplin sebesar 29.6%, dan yang menyebutkan disiplin sebesar 36.7%.

Tabel IV. 13. CARA PENERTIBAN PKL

No	Cara Penertiban PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak disiplin	3	1.3
2.	Kurang disiplin	78	32.5
3.	Cukup disiplin	71	29.6
4.	Disiplin	88	36.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 13

Gambaran tersebut dapat ditafsirkan bahwa meskipun angka yang menyebutkan cukup disiplin dan disiplin sebesar 66.3% dan yang menyebutkan tidak disiplin dan kurang disiplin sebesar 33.8% hal ini perlu diperhatikan bahwa tingkat kedisiplinan penertiban relatif cukup disiplin tetapi angka 33.8% cukup relatif besar terhadap keberhasilan implementasi.

Sifat pelaksanaan penertiban PKL dengan butir pertanyaan bagaimana pendapat responden terhadap sifat pelaksanaan penertiban PKL yang dilaksanakan Seksi Penertiban yang tersebut pada item ketigabelas mendapatkan tanggapan responden seperti pada tabel IV. 14 di bawah yang mendeskripsikan bahwa dari 240 responden yang menyatakan sifat pelaksanaan penertiban PKL lunak sebesar 35.4%, yang menyebutkan kurang keras 7.1%, yang menyebutkan cukup keras 44.2%, dan yang menyebutkan keras sebesar 13.3%.

Tabel IV. 14. SIFAT PELAKSANAAN PENERTIBAN PKL

No	Sifat Penertiban PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Lunak	85	35.4
2.	Kurang keras	17	7.1
3.	Cukup keras	106	44.2
4.	Keras	32	13.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 14

Dari angka-angka di atas sifat pelaksanaan penertiban lunak yang relatif cukup besar meskipun masih ditemukan pernyataan responden yang menyatakan cukup keras dan keras sebesar 57.5%.

Butir pertanyaan tentang manfaat pelaksanaan penertiban mendapatkan tanggapan responden sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.15 yang menggambarkan dari 240 responden yang menyebutkan pelaksanaan penertiban tidak menguntungkan sebanyak 4 responden (1.7%), yang menyebutkan kurang menguntungkan sebanyak 91 responden (37.9%), dan yang menyebutkan cukup menguntungkan sebanyak 67 responden (37.9%), serta yang menyebutkan pelaksanaan penertiban menguntungkan sebanyak 78 responden (32.5%).

Tabel IV. 15. MANFAAT PELAKSANAAN PENERTIBAN

No	Manfaat Penertiban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak menguntungkan	4	1.7
2.	Kurang menguntungkan	91	37.9
3.	Cukup menguntungkan	67	27.9
4.	Menguntungkan	78	32.5
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 15

Hasil di atas dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan program penertiban kurang menguntungkan bagi PKL karena pernyataan yang menyebutkan kurang menguntungkan relatif paling tinggi yakni sebanyak 91 responden (37.9%) sedangkan yang menyebutkan cukup menguntungkan hanya 27.9% dan yang menyebutkan menguntungkan sebesar 78 responden (32.5%).

Pada item kepatuhan PKL terhadap program penertiban mendapatkan tanggapan responden seperti tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 16. KEPATUHAN PKL TERHADAP PROGRAM PENERTIBAN

No	Kepatuhan terhadap Penertiban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak patuh terhadap penertiban	2	.8
2.	Kurang patuh terhadap penertiban	70	29.2
3.	Cukup patuh terhadap penertiban	77	32.1
4.	Patuh terhadap penertiban	91	37.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 16

Tabel di atas dapat diartikan bahwa dari 240 responden yang menyatakan tidak patuh terhadap penertiban sebesar 0.8%, yang menyatakan kurang patuh terhadap penertiban sebesar 29.2%, yang menyatakan cukup patuh terhadap penertiban sebesar 32.1%, dan yang menyatakan patuh terhadap penertiban sebesar 37.9%.

Pada indikator penyuluhan terdiri dari 7 butir pertanyaan diperlukan untuk mengetahui tanggapan PKL terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pada kegiatan penyuluhan PKL. Item enam belas yang menanyakan kehadiran PKL pada kegiatan penyuluhan mendapatkan perhatian responden seperti pada tabel tabel IV. 17 menggambarkan dari 240 responden yang menyebutkan kehadiran PKL dalam kegiatan penyuluhan sedikit 19.6%, yang menyebutkan kehadiran PKL dalam kegiatan penyuluhan kurang banyak 21.7%, yang menyebutkan kehadiran

PKL dalam kegiatan penyuluhan cukup banyak 29.6%, dan yang menyebutkan kehadiran PKL dalam kegiatan penyuluhan banyak 29.2%.

Tabel IV. 17. KEHADIRAN PKL PADA KEGIATAN PENYULUHAN

No	Presensi Penyuluhan	Frekuensi	Persentase
1.	Sedikit	47	19.6
2.	Kurang banyak	52	21.7
3.	Cukup banyak	71	29.6
4.	Banyak	70	29.2
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 17

Gambaran tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa jawaban responden cukup proporsional, tetapi pernyataan yang relatif paling tinggi adalah cukup banyak kehadiran PKL dalam kegiatan penyuluhan.

Pada item menanyakan tentang hubungan sesama PKL dalam kegiatan penyuluhan yang tersebut pada butir delapan belas mendapatkan tanggapan responden sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 18. HUBUNGAN SESAMA PKL DALAM KEGIATAN PENYULUHAN

No	Interaksi PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak akrab	4	1.7
2.	Kurang akrab	108	45.0
3.	Akrab	95	39.6
4.	Sangat akrab	33	13.8
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 18

Tabel di atas memberikan gambaran hubungan sesama PKL tidak akrab pada kegiatan penyuluhan 1.7%, yang menyebutkan kurang akrab relatif paling tinggi sebesar 45%, yang menyebutkan akrab hubungan sesama PKL pada kegiatan

penyuluhan sebesar 39.6 %, dan menyebutkan sangat akrab hubungan sesama PKL pada kegiatan penyuluhan sebesar 13.8%.

Penilaian responden terhadap hubungan sesama PKL pada kegiatan penyuluhan relatif kurang akrab seperti ditemukan angka sebesar 45% yang merupakan nilai tertinggi dari jawaban responden.

Butir pertanyaan tentang situasi lingkungan kerja dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hasil penyuluhan sehingga mewujudkan situasi kerja yang nyaman atau tidak, item tersebut mendapatkan tanggapan responden seperti tersebut pada tabel IV.19 di bawah ini :

Dari 240 responden yang menilai situasi lingkungan kerja tidak nyaman sebanyak 6 responden (2.5%), yang menilai situasi lingkungan kerja kurang nyaman sebanyak 15.8%, yang menilai cukup nyaman situasi lingkungan kerja sebanyak 44.6%, dan yang menilai nyaman situasi lingkungan kerja sebanyak 37.1%.

Tabel IV. 19. SITUASI LINGKUNGAN KERJA

No	Situasi Lingkungan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak nyaman	6	2.5
2.	Kurang nyaman	38	15.8
3.	Cukup nyaman	107	44.6
4.	Nyaman	89	37.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 19

Hasil tabel di atas dapat ditafsirkan tingkat kenyamanan situasi lingkungan kerja relatif cukup nyaman menurut responden seperti pada pendapat cukup nyaman 44.6% dan nyaman 37.1%, adapun yang menyatakan relatif kecil yakni yang menyebutkan tidak nyaman 6% dan kurang nyaman 15.8%.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat juga dengan cara mengukur tingkat keuntungan implementasi kebijakan itu sendiri, demikian juga pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, maka pada item kedua puluh daftar pertanyaan menanyakan hal ini. Hasil dari tanggapan responden ditayangkan pada tabel IV.20 yang menggambarkan dari 240 responden yang merasa penyuluhan yang diterima tidak menguntungkan sebesar 1.3%, yang merasa penyuluhan yang diberikan oleh Seksi Penyuluhan kepada PKL kurang menguntungkan sebesar 28,3%, dan yang menilai cukup menguntungkan sebesar 33.3%, sedangkan yang merasakan penyuluhan yang diterima menguntungkan sebesar 37.1%.

Tabel IV. 20. KEUNTUNGAN PENYULUHAN TERHADAP PKL

No	Keuntungan Penyuluhan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak menguntungkan	3	1.3
2.	Kurang menguntungkan	68	28.3
3.	Cukup menguntungkan	80	33.3
4.	Menguntungkan	89	37.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 20

Angka-angka dalam tabel yang cukup merata kecuali pada pernyataan “tidak menguntungkan” memberi gambaran bahwa penilaian tertinggi pada pernyataan “menguntungkan” dan nilai dibawahnya “cukup menguntungkan”. Dengan demikian tingkat keuntungan penyuluhan yang diterima PKL adalah relatif tinggi.

Sedangkan untuk mengukur implementasi kebijakan juga diperlukan bagaimana hasil implementasi kebijakan tersebut, dalam penelitian ini diperlukan tanggapan responden terhadap hasil penyuluhan yang dirasakan oleh PKL. Tanggapan responden tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 21. HASIL PENYULUHAN TERHADAP PKL

No	Hasil Penyuluhan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada	15	6.3
2.	Kurang	54	22.5
3.	Cukup	147	61.3
4.	Banyak	24	10.0
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 21

Tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%) yang merasakan tidak ada hasil dari penyuluhan yang dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan PKL Pemerintah Kota Surakarta sebesar 6.3%, yang merasakan “kurang” hasil penyuluhan yang dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan PKL Pemerintah Kota Surakarta sebesar 22.5%, yang merasakan “cukup” hasil penyuluhan yang dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan PKL Pemerintah Kota Surakarta sebesar 61.3%. Dan yang menilai hasil penyuluhan “banyak” sebesar 10%. Dengan demikian hasil di atas dapat ditafsirkan hasil penyuluhan yang dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan PKL Pemerintah Kota Surakarta dalam kategori relatif cukup berhasil.

Pada item kedua puluh dua ditanyakan pada responden tentang peningkatan usaha setelah mendapatkan pembimbingan dari Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta. Setelah dikumpulkan jawaban responden didapatkan hasil seperti ditampilkan dalam bentuk tabel tabel IV. 22 menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menilai tidak ada peningkatan usahanya setelah mendapat pembimbingan sebesar 17.5%, sedangkan yang menilai kurang meningkat usahanya sebesar 12.9%, dan yang menilai cukup meningkat usahanya sebesar 32.9%, sedangkan yang menilai meningkat usahanya setelah mendapat pembimbingan dari Seksi Pembinaan sebesar 36.7%.

Tabel IV. 22 PENINGKATAN SETELAH MENDAPAT PEMBIMBINGAN

No	Peningkatan Hasil Pembimbingan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak meningkat	42	17.5
2.	Kurang meningkat	31	12.9
3.	Cukup meningkat	79	32.9
4.	Meningkat	88	36.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 22

Dari hasil di atas dapat dimaknakan Seksi Pembinaan relatif berhasil dalam membina PKL sehingga PKL merasakan adanya peningkatan usaha.

Apakah peningkatan yang dirasakan PKL sebagaimana pada tampilan diatas akan berlangsung lama, atau malah sebaliknya, oleh karena itu peneliti menanyakan tentang kelangsungan usaha yang dirasakan PKL setelah mendapat pembimbingan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta. Hasil tanggapan tentang bagaimana kelangsungan usaha tersebut ditayangkan pada tabel IV. 23 yang dapat diartikan bahwa dari 240 responden (100%), yang menyatakan usahanya macet setelah mendapat pembimbingan dari Seksi Pembinaan sebesar 6,3%, yang menyatakan usahanya berlangsung kurang baik sebesar 17.9%. yang menyatakan usahanya berlangsung cukup baik 39.2%, yang menyatakan usahanya berlangsung membaik setelah mendapat pembimbingan dari Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta sebesar 36.7%.

Tabel IV. 23. KELANGSUNGAN USAHA SETELAH MENDAPAT PEMBIMBINGAN

No	Kelangsungan Usaha	Frekuensi	Persentase
1.	Macet	15	6.3
2.	Berlangsung kurang baik	43	17.9
3.	Berlangsung cukup baik	94	39.2
4.	Berlangsung membaik	88	36.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 23

Hasil di atas menggambarkan bahwa nilai tertinggi adalah yang menyatakan usahanya belangsung cukup baik yakni sebesar 39.2% dan yang menyatakan membaik sebesar 36.7%, artinya bahwa setelah mendapatkan pembimbingan dari Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta usaha PKL di Kecamatan Laweyan relatif meningkat dari sebelumnya.

Indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 juga diperlukan tanggapan responden tentang kemitraan usaha yang dibina oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta. Indikator kemitraan usaha terdiri dari tiga butir pertanyaan yang akan ditayangkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Butir pertanyaan tentang jumlah peserta kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan Pemerintah Kota Surakarta ditanggapi responden seperti ditampilkan pada tabel IV.24 di bawah ini :

Tabel IV. 24. JUMLAH PESERTA KEMITRAAN USAHA SETELAH MENDAPAT PEMBINAAN

No	Jumlah Peserta Kemitraan	Frekuensi	Persentase
1.	Sedikit	19	7.9
2.	Kurang banyak	64	26.7
3.	Cukup banyak	91	37.9
4.	Banyak kemitraan	66	27.5
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 24

7.9% dari 240 responden (100%) yang menyatakan sedikit jumlah peserta kemitraan setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL, 26.7% yang menyatakan kurang banyak jumlah peserta kemitraan setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL, 37.9% yang menyatakan cukup banyak jumlah peserta kemitraan setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL, 27.5% yang

menyatakan banyak jumlah peserta kemitraan setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta.

Pada butir kedua puluh lima menanyakan jumlah kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan mendapatkan tanggapan responden sebagaimana ditayangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 25. JUMLAH KEMITRAAN USAHA SETELAH MENDAPAT PEMBINAAN

No	Jumlah Kemitraan Usaha	Frekuensi	Persentase
1.	Sedikit	23	9.6
2.	Kurang banyak	66	27.5
3.	Cukup banyak	95	39.6
4.	Banyak kemitraan	56	23.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 25

Dari tayangan tabel di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menyatakan sedikit jumlah kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL sebesar 9.6%, dan yang menyatakan kurang banyak kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL sebesar 27.5%, adapun yang menyatakan cukup banyak kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL sebesar 39.6%, serta yang menyatakan banyak kemitraan usaha setelah mendapat pembinaan dari Seksi Pembinaan PKL sebesar 23.3%. Angka-angka di atas dapat diinterpretasikan bahwa pembinaan yang dilaksanakan Seksi Pembinaan PKL relatif berhasil dalam membina kemitraan usaha ditunjukkan angka sebesar 39.6% yang menilai cukup banyak kemitraan dan 23.3% menilai banyak kemitraan usaha.

Disamping jumlah peserta dan jumlah kemitraan usaha, diperlukan pula kelangsungan hubungan kemitraan, oleh karena itu pada butir kedua puluh

enam ditanyakan tentang kelangsungan hubungan kemitraan. Responden menanggapi pertanyaan tersebut diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 26. KELANGSUNGAN HUBUNGAN KEMITRAAN

No	Hubungan Kemitraan	Frekuensi	Persentase
1.	Berlangsung tidak baik	5	2.1
2.	Berlangsung kurang baik	20	8.3
3.	Berlangsung cukup baik	127	52.9
4.	Berlangsung baik	88	36.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 26

Pada tabel IV.26 menggambarkan 240 responden (100%), 2.1% menyatakan kelangsungan hubungan kemitraan berlangsung tidak baik, 8.3% menyatakan kelangsungan hubungan kemitraan berlangsung kurang baik, 52.9% menyatakan kelangsungan hubungan kemitraan berlangsung cukup baik, dan 36.7% menyatakan kelangsungan hubungan kemitraan berlangsung baik. Dengan melihat hasil di atas dapat diartikan kelangsungan hubungan kemitraan berlangsung relatif cukup baik bahkan cenderung relatif baik, hal ini dibuktikan dengan angka pernyataan responden yang menyatakan cukup baik 52.9% dan menyatakan baik 36.7% keduanya bila dijumlah persentase responden 89.6% menilai cenderung relatif baik.

Indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 termasuk diantaranya butir pertanyaan tentang inventarisasi masalah yang dihadapi PKL, indikator ini terdiri dari 3 item pertanyaan yaitu masalah yang dihadapi PKL, sifat masalah, dan cara pemecahan masalah. Ketiga butir pertanyaan tersebut ditampilkan pada tabel-tabel dibawah ini:

Pada butir pertanyaan tentang masalah yang dihadapi PKL ditanyakan jumlah masalah yang dihadapi PKL yang berhubungan dengan kegiatan PKL. Jawaban responden ditampilkan pada tabel IV.27 berikut ini :

Tabel IV. 27. MASALAH YANG DIHADAPI PKL

No	Masalah PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada masalah	45	18.8
2.	Sedikit masalah	68	28.3
3.	Cukup banyak masalah	48	20.0
4.	Banyak masalah	79	32.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 27

Tampilan tabel di atas dapat diungkapkan bahwa dari 240 responden (100%), yang menyebutkan tidak ada masalah sebesar 18.5%, yang menyebutkan punya sedikit masalah 28.3%, yang menyebutkan punya cukup banyak masalah sebesar 20%, dan yang menyebutkan punya banyak masalah sebesar 32.9%

Butir pertanyaan sifat masalah yang dihadapi responden yang tertuang pada item kedua puluh delapan mendapatkan tanggapan seperti ditampilkan pada tabel IV.28.

Tanggapan dari 240 responden (100%), 24.6% menyebutkan sifat masalah yang dihadapi responden bersifat individu, 24.6% menyebutkan sifat masalah yang dihadapi responden bersifat antar individu, 30.4% menyebutkan sifat masalah yang dihadapi responden bersifat kelompok, 20.4% menyebutkan sifat masalah yang dihadapi responden bersifat antar kelompok.

Tabel IV. 28. SIFAT MASALAH

No	Sifat Masalah	Frekuensi	Persentase
1.	Individu	59	24.6
2.	Antar individu	59	24.6
3.	Kelompok	73	30.4
4.	Antar kelompok	49	20.4
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 28

Hasil tanggapan responden di atas dapat dijelaskan bahwa sifat masalah yang dihadapi PKL kebanyakan bersifat kelompok, meskipun jumlah yang menyebutkan sifat masalah cukup merata, dari bersifat individu, antar individu, kelompok, dan antar kelompok.

Setelah diketahui sifat permasalahan yang dihadapi responden yaitu PKL, bagaimana tanggapan responden tentang cara pemecahan masalah yang disarankan oleh Seksi Pembinaan PKL, karena termasuk dalam *Job discription* Seksi Pembinaan untuk menginventarisasi masalah PKL, maka dalam penelitian ini juga diperlukan tanggapan responden tentang cara pemecahan masalah tersebut. Tanggapan responden tentang hal ini disebutkan pada tabel IV. 29 yang menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menilai cara pemecahan masalah yang disarankan oleh Seksi Pembinaan PKL tidak memuaskan sebesar 15.4%, 20% menilai cara pemecahan masalah yang disarankan oleh Seksi Pembinaan PKL kurang memuaskan, 42.5% menilai cara pemecahan masalah yang disarankan oleh Seksi Pembinaan PKL cukup memuaskan, dan yang menilai cara pemecahan masalah yang disarankan oleh Seksi Pembinaan PKL memuaskan sebesar 22.1%.

Tabel IV. 29. CARA PEMECAHAN MASALAH YANG DISARANKAN SEKSI PEMBINAAN PKL

No	Cara Pemecahan Masalah	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak memuaskan	37	15.4
2.	Kurang memuaskan	48	20.0
3.	Cukup memuaskan	102	42.5
4.	Memuaskan	53	22.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 29

Untuk mengetahui partisipasi responden terhadap apa yang diajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta, maka peneliti menanyakan bagaimana tingkat kesesuaian desain dasaran antara yang dilakukan PKL dengan yang diajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta, pertanyaan tersebut mendapat jawaban responden seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 30. KESESUAIAN DASARAN YANG DILAKUKAN PKL DENGAN YANG DIAJARKAN SEKSI PEMBINAAN PKL

No	Kesesuaian Dasaran	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak sesuai	40	16.7
2.	Kurang sesuai	86	35.8
3.	Sesuai	96	40.0
4.	Sangat sesuai	18	7.5
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 30

Pada tabel IV.30 di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), 16.7% menilai tidak sesuai antara yang dilakukan PKL dengan yang ajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta, 35.8% menilai kurang sesuai antara yang dilakukan PKL dengan yang ajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta, 40% menilai sesuai antara yang dilakukan PKL dengan yang

ajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta, dan 7.5% menilai sangat sesuai antara yang dilakukan PKL dengan yang ajarkan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil di atas dapat diinterpretasikan bahwa tingkat kesesuaian antara yang dilakukan PKL dengan yang diajarkan Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta relatif tidak sesuai karena bila diperhatikan angka yang menilai tidak sesuai 16.7% dan yang menyatakan kurang sesuai 35.8% apabila dijumlah menjadi 52.5%, sedangkan yang menyebutkan sesuai 40% dan yang menyatakan sangat sesuai hanya 7.5% dan bila dijumlah hanya 47.5%.

Indikator implementasi kebijakan terakhir dalam penelitian ini adalah penempatan zona yang terdiri dari dua butir pertanyaan yakni tentang tingkat kepatuhan terhadap zona larangan dan sanksi terhadap pelanggar zona larangan.

Pada item kepatuhan PKL terhadap zona larangan mendapat jawaban dari responden yang ditayangkan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 31. KEPATUHAN PKL TERHADAP ZONA LARANGAN

No	Kepatuhan PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak patuh	31	12.9
2.	Cukup patuh	87	36.3
3.	Patuh	101	42.1
4.	Sangat patuh	21	8.8
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 31

Tabel di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menyebutkan tidak patuh terhadap zona larangan sebesar 12.9%, 36.3% menyebutkan cukup patuh terhadap zona larangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, 42.1% menyebutkan patuh terhadap zona larangan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Surakarta, dan 8.8% menyebutkan sangat patuh terhadap zona larangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Bila diperhatikan angka-angka pada tabel di atas dapat diartikan hampir sebanding antara yang menyatakan patuh dan tidak patuh seperti ditunjukkan penjumlahan angka persentase yang tidak patuh dan kurang patuh sebesar 49.1% sedangkan penjumlahan angka yang patuh dan sangat patuh sebesar 50.9%.

Item ke tigapuluh yang menanyakan ketegasan pengenaan sanksi bagi pelanggar zona larangan diperlukan untuk mengetahui kepastian peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta yakni Perda No. 8 Tahun 1995. Pada item ini mendapatkan tanggapan responden sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 32. TINGKAT PENGENAAN SANKSI PELANGGAR ZONA LARANGAN

No	Pengenaan Sanksi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tegas	14	5.8
2.	Kurang tegas	62	25.8
3.	Tegas	133	55.4
4.	Sangat tegas	31	12.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 32

Tabel IV.32 di atas dapat diinterpretasikan dari 240 responden (100%), 5.8% menyatakan tingkat pengenaan sanksi terhadap pelanggar zona larangan tidak tegas, 25.8% menyatakan kurang tegas pengenaan sanksi terhadap pelanggar zona larangan, 55.4% menyatakan tegas pengenaan sanksi terhadap pelanggar zona larangan, 12.9% menyatakan sangat tegas pengenaan sanksi terhadap pelanggar zona larangan.

Berdasarkan hasil jawaban 240 responden (100%) terhadap tiga puluh dua butir pertanyaan tentang indikator-indikator implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Jawaban responden ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV. 33. DISTRIBUSI FREKUENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

No.	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak berhasil	63 - 81	70	29.2
2.	Cukup berhasil	82 - 99	90	37,5
3.	Berhasil	100 - 118	80	33,3
	Jumlah		240	100

Sumber : Diolah dari jawaban No. 1-32

Distribusi frekuensi variabel implementasi kebijakan dapat dikategorikan relatif cukup baik bahkan cenderung dikategori baik bila diperhatikan dari 240 responden (100%), nilai interval 63-81 pada kategori tidak baik sebesar 29.2%, 37.5% memberikan penilaian cukup baik pada nilai interval 82-99, dan 33.3% memberikan penilaian baik pada nilai interval 100-118.

Hasil kuantitatif di atas akan dikonfirmasi dengan hasil kualitatif yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung atau bahkan menolak hasil kuantitatif.

Hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban RAS (Rukun Agawe Santoso) menyebutkan bahwa bentuk kegiatan untuk mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 1995 dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti mendatangi kelompok-kelompok kegiatan arisan, kelompok kegiatan kerohanian (pengajian), dan pada saat ada kegiatan tahunan misalnya halal-bihalal.

Kehadiran pelaksana pembinaan, penataan, penertiban dan penyuluhan pada saat paguyuban menyelenggarakan kegiatan disambut dengan baik oleh para PKL karena disamping akan mendapatkan informasi tentang usaha mereka juga

dapat mengutarakan keluhan (*uneg-uneg*) yang dirasakan atau bahkan isu-isu yang merebak dikalangan mereka misalnya tentang penataan, penertiban dengan cara tukar pendapat (*brainstorming*) antara anggota paguyuban PKL dengan petugas dari Pemerintah Kota Surakarta.

Bentuk kegiatan dalam upaya mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 1995 yang paling disenangi oleh para PKL adalah kegiatan yang berupa musyawarah dengan model tukar pendapat dan kegiatan yang bersifat kekeluargaan dengan alasan dapat meningkatkan hubungan kekerabatan antar teman kerja satu profesi dengan menyampaikan dan menerima informasi usaha, dan informasi-informasi yang lain termasuk informasi kekeluargaan seperti keluarga ada yang punya hajat, keluarga ada yang sedang sakit, dan sebagainya.

A.3. Kondisi Lingkungan (Variabel X1)

Untuk mendapatkan gambaran keberhasilan implementasi kebijakan perlu mengetahui gambaran kondisi lingkungan lokasi PKL melakukan kegiatan operasionalnya. Kondisi lingkungan dalam konteks penelitian ini dipergunakan sebagai variasi yang mempunyai indikator-indikator kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan, kerawanan lalu lintas dan persetujuan warga setempat. Dari indikator-indikator tersebut di atas dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan, dan mendapatkan jawaban responden kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan diuraikan masing-masing tabel.

Pada butir pertanyaan ketiga puluh tiga yang menanyakan kerjasama dalam kegiatan yang dilakukan antar PKL dalam mewujudkan kebersihan lingkungan PKL mendapatkan tanggapan responden seperti ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 34. KERJASAMA PKL DALAM PERWUJUDAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

No	Perwujudan Kebersihan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak adanya kerjasama	5	2.1
2.	Kurang adanya kerjasama	27	11.3
3.	Cukup bisa kerjasama	107	44.6
4.	Adanya kerjasama yang baik	101	42.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 33

Dari 240 responden (100%), yang menjawab tidak ada kerjasama antar PKL dalam mewujudkan kebersihan lingkungan sebesar 2.1%, 11.3% menjawab kurang adanya kerjasama, 44.6% menjawab cukup bisa kerjasama, dan 42.1% menjawab adanya kerjasama yang baik antar PKL dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Hasil di atas dapat diartikan bahwa tingkat kerjasama antar PKL dalam mewujudkan kebersihan relatif cukup tinggi dan cenderung relatif tinggi bila memperhatikan penjumlahan angka-angka yang menyatakan cukup bisa kerjasama dan adanya kerjasama yang baik sebesar 86.7%.

Selain kebersihan diperlukan keindahan dilingkungan PKL, maka pada butir ketiga puluh empat ditanyakan bagaimana pendapat responden tidak tepat kerjasama dalam kegiatan yang dilakukan antar PKL dalam mewujudkan keindahan lingkungan PKL. Jawaban responden pada item ini ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 35. KERJASAMA PKL DALAM PERWUJUDAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

No	Perwujudan Keindahan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak adanya kerjasama	4	1.7
2.	Kurang adanya kerjasama	23	9.6
3.	Cukup bisa kerjasama	132	55.0
4.	Adanya kerjasama yang baik	81	33.8
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 34

Tabel IV.35 di atas diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%), yang menyatakan tidak ada kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keindahan lingkungan sebesar 1.7%, 9.6% menyatakan kurang adanya kerjasama, 55 % menyatakan cukup bisa kerjasama, 33.8% menyatakan adanya kerjasama yang baik dalam mewujudkan keindahan lingkungan. Angka-angka dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa angka tertinggi pada 55% yaitu pada cukup adanya kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keindahan lingkungan.

Sedangkan pada butir kerjasama PKL dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan mendapatkan jawaban dari responden seperti pada tabel IV. 36 memberi gambaran bahwa dari 240 responden (100%), 1.3% responden menyebutkan tidak ada kerjasama dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan, 10.8% responden menyebutkan kurang ada kerjasama dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan, 49.6% responden menyebutkan cukup ada kerjasama dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan, dan 38.3% responden menyebutkan ada kerjasama yang baik dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan.

Tabel IV. 36. KERJASAMA PKL DALAM PERWUJUDAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

No	Perwujudan Kenyamanan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak adanya kerjasama	3	1.3
2.	Kurang adanya kerjasama	26	10.8
3.	Cukup bisa kerjasama	119	49.6
4.	Adanya kerjasama yang baik	92	38.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 35

Dalam butir pertanyaan tentang kerjasama PKL dalam mewujudkan keamanan lingkungan mendapat jawaban responden seperti pada tampilan tabel IV.37 yang menggambarkan 240 responden (100%), yang menyatakan tidak ada kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebesar 2.1%, yang menyatakan kurang adanya kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebesar 30.8%, yang menyatakan cukup adanya kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebesar 28.8%, dan yang menyatakan ada kerjasama yang baik antar PKL dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebesar 38.3%.

Tabel IV. 37. KERJASAMA PKL DALAM PERWUJUDAN KEAMANAN LINGKUNGAN

No	Perwujudan Kenyamanan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak adanya kerjasama	5	2.1
2.	Kurang adanya kerjasama	74	30.8
3.	Cukup bisa kerjasama	69	28.8
4.	Adanya kerjasama yang baik	92	38.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 36

Bila dilihat angka frekuensi maupun angka persentase pada tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa kerjasama antar PKL dalam mewujudkan keamanan relatif cukup

baik karena pada angka persentase bila dijumlah yang menyebutkan cukup bisa kerjasama dan adanya kerjasama yang baik menjadi 67.1%.

Dalam mengukur kondisi lingkungan ditanyakan juga bagaimana terjadinya kemacetan lalu lintas di lingkungan PKL karena hal ini akan mempengaruhi kerawanan dalam berlalu lintas, dan kerawanan sosial di lingkungan PKL. Butir pertanyaan tentang kemacetan lalu lintas dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 38. KEMACETAN LALU LINTAS DI LINGKUNGAN PKL

No	Lalu Lintas	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu macet	1	.4
2.	Sering macet	34	14.2
3.	Kadang-kadang macet	46	19.2
4.	Tidak macet	159	66.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 37

Pada tabel IV.38 diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%), 0.4 % menyebutkan selalu macet, 14.2% menyebutkan sering macet, 19.2% menyebutkan kadang-kadang macet, 66.2% menyebutkan lalu lintas di lingkungan PKL tidak macet.

Apabila sering terjadi kemacetan lalu lintas, maka sangat dimungkinkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan demikian sebaliknya. Dari asumsi tersebut sehingga peneliti menanyakan juga tentang terjadinya kecelakaan di lingkungan responden. Pada butir pertanyaan ketigapuluh delapan mendapat jawaban responden seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 39. KECELAKAAN LALULINTAS DI LINGKUNGAN PKL

No	Kecelakaan Lalu Lintas	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu terjadi	3	1.3
2.	Sering terjadi	18	7.5
3.	Kadang-kadang terjadi	110	45.8
4.	Tidak pernah terjadi	109	45.4
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 38

Tabel IV.39 di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%), 1.3% menyebutkan kecelakaan lalu lintas di lingkungannya selalu terjadi, 7.5% menyebutkan kecelakaan lalu lintas di lingkungannya sering terjadi, 45.8% menyebutkan kecelakaan lalu lintas di lingkungannya kadang-kadang terjadi, dan 45.4% menyebutkan kecelakaan lalu lintas di lingkungannya tidak pernah terjadi.

Bila dihubungkan dengan tabel IV.38 memang angka-angka dalam tabel terdapat relevansi adanya asumsi tersebut di atas, tetapi jawaban responden yang menyebutkan kadang-kadang terjadi kecelakaan pada tabel IV.39 cukup tinggi yakni sebesar 45.8% dengan demikian kerawanan kecelekaan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian bagi pengambil kebijakan.

Dengan kehadiran PKL pada suatu tempat, dimungkinkan terjadinya keresahan masyarakat dilingkungan PKL beroperasi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan bagi PKL maka diperlukan tanggapan responden, jawaban responden pada butir pertanyaan ini ditayangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 40. PERSETUJUAN WARGA SETEMPAT TERHADAP USAHA PKL

No	Persetujuan Warga	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak setuju	1	.4
2.	Kurang setuju	14	5.8
3.	Setuju	179	74.6
4.	Sangat setuju	46	19.2
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 39

Tabel di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menyebutkan masyarakat sekitar PKL beroperasi tidak setuju relatif kecil yaitu sebesar 0.4%, yang menyebutkan masyarakat sekitar PKL beroperasi kurang setuju relatif kecil yaitu sebesar 5.8%, yang menyebutkan masyarakat sekitar PKL beroperasi setuju relatif tinggi yaitu sebesar 74.6%, adapun yang menyebutkan masyarakat sekitar PKL beroperasi sangat setuju relatif cukup besar yaitu sebesar 19.2%. Angka-angka tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di lingkungan PKL relatif setuju dengan kehadiran PKL, hal itu dimungkinkan adanya pendapat yang menyebutkan kehadiran PKL memudahkan masyarakat sekitar mudah dan dekat dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pedagang kaki lima tersebut adalah warga di sekitar lokasi itu sendiri.

Apabila masyarakat setuju dengan kehadiran PKL, maka dapat diasumsikan warga masyarakat setempat akan ramah terhadap PKL. Tetapi sebaliknya apabila masyarakat setempat tidak setuju kehadiran PKL maka warga masyarakat setempat tidak akan ramah terhadap PKL. Untuk itu diperlukan pertanyaan tentang keramahan warga setempat terhadap PKL, dan mendapatkan jawaban responden sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV. 41. KERAMAHAN WARGA SETEMPAT TERHADAP USAHA PKL

No	Keramahan Warga Setempat	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ramah	0	0
2.	Kurang ramah	5	2.1
3.	Ramah	169	70.4
4.	Sangat ramah	66	27.5
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 40

Tabel di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menyebutkan warga masyarakat setempat tidak ramah terhadap PKL cukup drastis yakni 0%, yang menyebutkan warga masyarakat setempat kurang ramah terhadap PKL sebesar 2.1%, yang menyebutkan warga masyarakat setempat ramah terhadap PKL cukup drastis yakni 70.4%, yang menyebutkan warga masyarakat setempat sangat ramah terhadap PKL cukup drastis yakni 27.5%. Dari angka-angka pada tabel tersebut di atas menggambarkan warga masyarakat setempat relatif ramah terhadap kehadiran usaha PKL di lingkungannya.

Berdasarkan hasil perhitungan tentang variabel kondisi lingkungan PKL Kecamatan Laweyan Surakarta menunjukkan bahwa dari 240 responden, 15% responden menilai tentang kondisi lingkungan di sekitar PKL beroperasi buruk, 64.6% responden menilai tentang kondisi lingkungan di sekitar PKL beroperasi cukup, 20.4% responden menilai tentang kondisi lingkungan di sekitar PKL beroperasi baik. Perhitungan kategori dan penilaian tersebut dicantumkan pada tabel distribusi frekuensi kondisi lingkungan di bawah ini :

Tabel IV. 42. DISTRIBUSI FREKUENSI KONDISI LINGKUNGAN

No.	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Buruk	19 – 23	36	15
2.	Cukup	24 – 28	155	64,6
3.	Baik	29 - 32	49	20,4
	Jumlah		240	100

Sumber : Diolah dari jawaban No. 33-40

Hasil Kategori pada distribusi frekuensi kondisi lingkungan di atas senada dengan wawancara Ketua Paguyuban RAS (Rukun Agawe Santoso) PKL Kecamatan Laweyan yang menyebutkan bahwa kondisi lingkungan PKL “lumayan aman, teman-teman cukup bisa menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di wilayah bekerjanya”.

Dari konfirmasi dengan sumber informasi (Bapak Wid Sukamto) tentang kondisi lingkungan seperti adanya keberadaan PKL yang melanggar zona, kegiatan PKL dalam memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan didapatkan informasi sebagai berikut :

Sebagian besar dari PKL yang melanggar zona dan tidak mau pindah disebabkan takut akan diganti oleh pedagang lain, dan bahkan tidak tegasnya pelaksana penertiban sehingga apabila satu PKL satu diperingatkan lalu pindah tetapi ada PKL lain yang datang tetapi tidak diperingatkan atau sudah diperingatkan tapi nekat dan tetap menetap disuatu tempat (zona larangan) tersebut, maka menjadikan kekhawatiran pindahnya PKL untuk pindah tempat meskipun melanggar zona larangan.

Pada sosialisasi Perda No. 8 Tahun 1995 juga disampaikan agar PKL setelah melakukan kegiatan usahanya membawa pulang atau menyimpan alat

usahanya, seperti gerobag dan perlengkapannya. Kemudian PKL juga diwajibkan membersihkan lingkungan tempat usahanya setelah kegiatan usahanya selesai.

Kondisi lingkungan juga menyangkut bagaimana tanggapan warga disekitar kegiatan usaha PKL, perihal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Susetyo, SH yang memberikan penjelasan bahwa memang ada warga yang merasakan ketakutan disekitar PKL berusaha disebabkan adanya disekitar PKL ada yang suka minum-minuman keras. Tetapi sebaliknya ada yang merasa senang karena di daerahnya aman karena ada yang jaga malam dan ada pula yang memberikan alasan senang karena mudah dan dekat untuk membeli kebutuhan yang diinginkan dengan harga terjangkau.

A.4. Komunikasi (Variabel X2)

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan, pembinaan dan penertiban PKL, maka perlu diketahui juga bagaimana komunikasi yang berjalan sejak sebelum Perda No. 8 Tahun 1995 diluncurkan sampai dengan implementasi kebijakannya. Karena komunikasi ini merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan sehingga dalam penelitian ini ditanyakan dalam kuesioner yang terdiri dari empat indikator dan delapan butir pertanyaan. Hasil jawaban responden ditayangkan dalam tabel dan uraian satu persatu dibawah ini :

Pemahaman tentang Perda No. 8 Tahun 1995 sangat diperlukan bagi obyek implementasi kebijakan, untuk itu pemahaman ini digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. Hasil jawaban dari responden yang menyebutkan tingkat pemahaman Perda No. 8 Tahun 1995 dicantumkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 43. PEMAHAMAN PKL TERHADAP PERDA NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN

No	Pemahaman PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak paham	59	24.6
2.	Kurang paham	78	32.5
3.	Paham	99	41.3
4.	Sangat paham	4	1.6
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 41

Dari tayangan tabel di atas dapat diartikan bahwa dari 240 responden (100%), 24.6% menyatakan tidak paham terhadap Perda No. 8 Tahun 1995, 32.5% menyatakan kurang paham terhadap Perda No. 8 Tahun 1995, sedangkan yang menyatakan paham terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 sebesar 41.3%. Dan yang menyebutkan sangat paham hanya 1.6%. Tabel di atas juga dapat diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%), 57.1% pada tingkatan tidak paham dan kurang paham dan 42.9% pada tingkatan paham dan sangat paham sehingga bila persentase yang besar pada tingkatan tidak paham dan kurang paham.

Dalam membuat kebijakan diperlukan keterlibatan stakeholder, hal ini juga dilakukan dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, maka pada butir keempat puluh dua ditanyakan bagaimana keterlibatan kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995. Dari jawaban responden di tampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 44. KETERLIBATAN KELOMPOK PKL DALAM MEMBUAT PERDA NO. 8 TAHUN 1995.

No	Keterlibatan Kelompok PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak terlibat	97	40.4
2.	Kurang terlibat	71	29.6
3.	Cukup terlibat	53	22.1
4.	Keterlibatannya sangat tinggi	19	7.9
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 42

Tayangan tabel di atas menggambarkan 40.4% responden dari 240 responden (100%) menyebutkan tidak terlibat dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, 29.6% menyebutkan kurang terlibat dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, 22.1% menyebutkan cukup terlibat dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, dan 7.9% menyebutkan keterlibatannya sangat tinggi dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995.

Peran serta kelompok dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995. Dapat diwujudkan dalam memberikan masukan, memberikan konsep dan pandangan tentang penataan, pembinaan, dan penertiban. Pada butir pertanyaan peran serta kelompok PKL ini mendapat jawaban responden sebagaimana pada tampilan tabel di bawah ini :

Tabel IV. 45. PERAN SERTA KELOMPOK PKL DALAM MEMBUAT PERDA NO. 8 TAHUN 1995.

No	Keterlibatan Kelompok PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak berperan	71	29.6
2.	Kurang berperan	68	28.3
3.	Berperan	60	25.0
4.	Sangat berperan	41	17.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 43

Dari tampilan tabel di atas menggambarkan 240 responden (100%), yang menyebutkan tidak berperan serta kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995 sebesar 29.6%, 28.3% yang menyatakan kurang berperan serta kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, 25% yang menyatakan berperan serta kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995, 17.1% yang menyatakan sangat berperan serta kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995. Dapat disimpulkan bahwa dari semua responden paling besar menyatakan tidak berperan kelompok PKL dalam membuat Perda No. 8 Tahun 1995. Hal ini dimungkinkan yang berperan serta adalah pengurus paguyuban, sedangkan responden tidak semua pengurus paguyuban.

Untuk mengukur tingkat komunikasi diperlukan kemampuan pelaksana dalam menyampaikan penyuluhan pada obyek implementasi kebijakan, untuk itu pertanyaan pada kemampuan pelaksanaan dalam penyuluhan mendapatkan tanggapan responden seperti pada tabel Tabel IV. 46. Dari 240 responden (100%), yang menyatakan pelaksana penyuluhan tidak mampu sebesar 3.8%, yang menyatakan pelaksana penyuluhan kurang mampu sebesar 27.5%, yang menyatakan pelaksana penyuluhan mampu sebesar 65.4%, dan yang menyatakan pelaksana penyuluhan kurang sangat mampu sebesar 3.3%.

Tabel IV. 46. KEMAMPUAN PELAKSANA PENYULUHAN

No	Kemampuan Pelaksana	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mampu	9	3.8
2.	Kurang mampu	66	27.5
3.	Mampu	157	65.4
4.	Sangat mampu	8	3.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 44

Dari angka-angka dalam tabel di atas, angkat tertinggi pada pernyataan mampu sebesar 65.4% dengan demikian pelaksana penyuluhan menurut responden relatif mampu melaksanakan penyuluhan kepada PKL.

Disamping pelaksana penyuluhan, pada butir pertanyaan keempat puluh lima ditanyakan pada responden tentang kemampuan pelaksana pembinaan. Hasil tanggapan responden terhadap pertanyaan tersebut disebutkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 47. KEMAMPUAN PELAKSANA PEMBINAAN

No	Kemampuan Pelaksana	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mampu	9	3.8
2.	Kurang mampu	69	28.8
3.	Mampu	158	65.8
4.	Sangat mampu	4	1.7
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 45

Tabel di atas dapat diartikan dari 240 responden (100%), 3.8% menyebutkan pelaksana pembinaan tidak mampu dalam memberikan pembinaan kepada PKL, 28.8% menyebutkan pelaksana pembinaan kurang mampu dalam memberikan pembinaan kepada PKL, 65.8% menyebutkan pelaksana pembinaan mampu dalam memberikan pembinaan kepada PKL, 1.7% menyebutkan pelaksana pembinaan sangat mampu dalam memberikan pembinaan kepada PKL. Hasilnya yang serupa dengan tabel IV.46 yaitu pada pernyataan pelaksana pembinaan mampu dalam memberikan pembinaan kepada PKL.

Pada butir pertanyaan keempat puluh enam menanyakan tentang kemampuan pelaksana penertiban dalam menertibkan PKL. Jawaban dari 240 responden (100%) yang menyatakan pelaksana penertiban tidak mampu sebesar

2.5%, sedangkan yang menyatakan pelaksana penertiban kurang mampu sebesar 35%, yang menyatakan pelaksana penertiban mampu sebesar 54.2%, dan yang menyatakan pelaksana penertiban sangat mampu sebesar 8.3%. Uraian ini dapat dengan mudah ditayangkan pada tabel IV.48 dibawah ini :

Tabel IV. 48. KEMAMPUAN PELAKSANA PENERTIBAN

No	Kemampuan Pelaksana	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mampu	6	2.5
2.	Kurang mampu	84	35.0
3.	Mampu	130	54.2
4.	Sangat mampu	20	8.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 46

Tayangan tabel di atas jug dapat diinterpretasikan bahwa dari dari 240 responden (100%) yang menilai tertinggi adalah pernyataan yang menyebutkan pelaksana penertiban mampu dalam melaksanakan tugas penertiban kepada PKL, tetapi ada sebesar 35% yang menyebutkan kurang mampu, dan angka ini cukup besar persentasenya sehingga perlu mendapat perhatian bagi pengambil kebijakan.

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, untuk mengetahui seberapa pengaruh tersebut dapat digunakan indikator kesesuaian isi peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, apabila komunikasi lancar dari atas kebawah dan juga sebaliknya dari bawah ke atas sangat dimungkinkan kesesuaian isi peraturan dengan pelaksanaan di lapangan akan tinggi. Hasil dari jawaban responden tentang kesesuaian isi peraturan dengan pelaksanaan tersebut ditampilkan secara ringkas pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 49. KESESUAIAN ISI PERATURAN DENGAN PELAKSANAAN

No	Kesesuaian Isi Peraturan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak sesuai	30	12.5
2.	Kurang sesuai	86	35.8
3.	Sesuai	112	46.7
4.	Sangat sesuai	12	5.0
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 47

Tabel di atas menunjukkan dari 240 responden (100%), 12.5% menyebutkan tidak sesuai antara isi Perda No. 8 Tahun 1995 dengan pelaksanaan di lapangan, 35.8% menyebutkan kurang sesuai antara isi Perda No. 8 Tahun 1995 dengan pelaksanaan di lapangan, 46.7% menyebutkan sesuai antara isi Perda No. 8 Tahun 1995 dengan pelaksanaan di lapangan, 5% menyebutkan sangat sesuai antara isi Perda No. 8 Tahun 1995 dengan pelaksanaan di lapangan. Bila diperhatikan tingkat kesesuaian isi peraturan dengan pelaksanaan dari hasil jawaban responden tersebut dapat interpretasikan juga bahwa yang menilai sesuai sebesar 46.7% merupakan penilaian tertinggi, penilaian tertinggi kedua yang menyebutkan tingkat kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan kurang sesuai 35.8%, bahkan nilai tertinggi ketiga yang menyebutkan tingkat kesesuaian antara isi peraturan dan pelaksanaan tidak sesuai sebesar 12.5%.

Pada variabel komunikasi juga menanyakan tingkat kejelasan pada saat penyuluhan dilaksanakan, hasil dari jawaban responden ditampilkan dalam tabel IV.50 yang memberi gambaran tingkat kejelasan penyuluhan yang diterima dari 240 responden (100%) adalah 2.9% menyebutkan tidak jelas dalam menerima penyuluhan di petugas penyuluhan, 32.1% menyebutkan kurang jelas dalam menerima penyuluhan di petugas penyuluhan, 51.3% menyebutkan jelas dalam

menerima penyuluhan di petugas penyuluhan, 13.8% menyebutkan sangat jelas dalam menerima penyuluhan di petugas penyuluhan.

Tabel IV. 50. TINGKAT KEJELASAN PENYULUHAN PADA PKL

No	Kejelasan Penyuluhan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak jelas	7	2.9
2.	Kurang jelas	77	32.1
3.	Jelas	123	51.3
4.	Sangat jelas	33	13.8
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 48

Nilai persentase dari butir pertanyaan kejelasan penyuluhan ini adalah responden menyatakan jelas (51.3%) dalam menerima penyuluhan yang diberikan oleh Seksi Penyuluhan Pemerintah Kota Surakarta.

Sedangkan pada butir pertanyaan tentang tingkat kejelasan program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL Pemerintah Kota Surakarta dijawab responden seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 51. TINGKAT KEJELASAN PROGRAM TENTANG PKL

No	Kejelasan Program	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak jelas	12	5.0
2.	Kurang jelas	59	24.6
3.	Jelas	144	60.0
4.	Sangat jelas	25	10.4
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 49

Jawaban dari 240 responden (100%) pada tabel di atas terdiri dari 5% yang menjawab tidak jelas program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penataan dan Penertiban Pemerintah Kota Surakarta, 24.6% yang menjawab kurang jelas program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penatan dan Penertiban Pemerintah

Kota Surakarta, 60% yang menjawab jelas program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penatan dan Penertiban Pemerintah Kota Surakarta, 10.4% yang menjawab sangat jelas program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penatan dan Penertiban Pemerintah Kota Surakarta. Terlihat angka presentase pada tabel di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa responden yang menjawab jelas program yang diberikan oleh Seksi Pembinaan, Penatan dan Penertiban Pemerintah Kota Surakarta menempati persentase paling tinggi dan dapat diartikan program pembinaan, penataan dan penertiban pada kategori relatif jelas bagi obyek implementasi kebijakan.

Dari jawaban responden seluruh butir-butir pertanyaan pada indikator komunikasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan dengan nilai interval dan persentase. Kategori komunikasi adalah lancar, cukup lancar, dan tidak lancar. Distribusi frekuensi dan kategori komunikasi ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel IV. 52. DISTRIBUSI FREKUENSI KOMUNIKASI

No.	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak lancar	10 – 17	36	15
2.	Cukup lancar	18 - 25	134	55.8
3.	Lancar	26 - 34	70	29.2
	Jumlah		240	100

Sumber : Diolah dari jawaban No. 41-49

Tabel distribusi frekuensi komunikasi di atas dapat ditafsirkan bahwa dari 240 responden (100%), 15% menilai komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tidak lancar, 55.8% menilai komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori cukup lancar,

29.2% menilai komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori lancar.

Pada kategori di atas nilai paling tinggi adalah pada kategori cukup lancar hal ini dapat dikonfirmasi dengan hasil kualitatif yaitu hasil wawancara dengan sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pengelolaan PKL Surakarta (Bp. Drs. Bambang Santoso, MM) menyebutkan bahwa komunikasi dalam implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 cukup efektif, adapun bagaimana kesesuaian tujuan program dengan kondisi lapangan memang tidak sepenuhnya sesuai tetapi paling tidak ada usaha dan pembenahan dan mempertahankan Kota Solo sebagai Kota Berseri disamping untuk mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta.

Kejelasan program pada Perda No. 8 Tahun 1995 juga disebutkan sumber informasi bahwa Perda No. 8 Tahun 1995 tersebut dilanjutkan dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang digunakan sebagai alat kerja dilapangan.

Sedangkan menurut Bapak Wid Sukanto menyebutkan kejelasan program Perda No. 8 Tahun 1995 ini cukup jelas, tetapi masih ada ketimpangan dan kekurangjelasan definisi PKL, apakah jenis usaha yang disebut PKL seperti ATM, penjual roti dengan mobil pick up yang memasang iklan dan memasang stand diberbagai tempat itu juga termasuk PKL, siapa yang melakukan usaha seperti ATM pelaku bisnisnya bank yang dipastikan modal usahanya besar demikian juga penjaja roti dengan mobil pick up yang memasang iklan dan punya banyak stand diasumsikan memiliki banyak modal, sifat usaha misalnya apakah dengan mobil pick up tadi tidak termasuk PKL karena bisa segera datang dan pergi dan alat penjualan yang modern serta kemasan yang mungkin higienis.

A.5. Perilaku Pelaksana (Variabel X3)

Untuk mendapatkan gambaran perilaku pelaksana pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Pemerintah Kota Surakarta. Tanggungjawab pelaksana yang tinggi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Selain Tanggungjawab pelaksana juga dibutuhkan kejujuran dan kedisiplinan pelaksana untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Pemerintah Kota Surakarta.

Indikator tanggungjawab terdiri dari empat butir pertanyaan yang menanyakan tentang ketepatan waktu, keseriusan pelaksanaan dalam pembinaan, keseriusan pelaksana dalam penertiban, keseriusan pelaksana dalam penyuluhan. Pada butir pertanyaan ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan dijawab responden sebagaimana pada tampilan tabel IV.53 di bawah yang dapat diinterpretasikan bahwa dari 240 responden (100%), 13.8% responden menyatakan kehadiran petugas penyuluhan tidak tepat waktu pada kegiatan penyuluhan, 39.2% responden menyatakan kehadiran petugas penyuluhan kurang tepat waktu pada kegiatan penyuluhan, 42.4% responden menyatakan kehadiran petugas penyuluhan tepat waktu pada kegiatan penyuluhan, sedangkan yang menyatakan kehadiran petugas penyuluhan sangat tepat waktu pada kegiatan penyuluhan hanya 4.6%. Hasil penjumlahan persentase dari yang menyatakan tidak tepat waktu dan kurang tepat waktu sebesar 53%, dan hasil penjumlahan persentase dari yang menyatakan tepat waktu dan sangat tepat waktu sebesar 47%.

Dengan demikian dapat dinilai ketepatan waktu pelaksana dapat dinilai cukup tepat waktu karena nilai tertinggi persentase pada tepat waktu, tetapi penjumlahan persentase cenderung relatif lebih besar kurang dan tidak tepat waktu.

Tabel IV. 53. KETEPATAN WAKTU KEDATANGAN PETUGAS PENYULUHAN

No	Kedatangan Petugas	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tepat waktu	33	13.8
2.	Kurang tepat waktu	94	39.2
3.	Tepat waktu	102	42.4
4.	Sangat tepat waktu	11	4.6
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 50

Butir pertanyaan yang menanyakan keseriusan dalam melaksanakan tugas pembinaan mendapatkan jawaban responden seperti pada tayangan tabel di bawah ini :

Tabel IV. 54. TINGKAT KESERiusAN PEMBINAAN PKL

No	Pembinaan PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak serius	8	3.3
2.	Kurang serius	87	36.3
3.	Serius	128	53.3
4.	Sangat serius	17	7.1
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 51

Tayangan tabel di atas yang menyebutkan dari 240 responden (100%) yang menyebutkan tidak serius petugas pembinaan PKL dalam melaksanakan tugas sebesar 3.3%, yang menyebutkan kurang serius petugas pembinaan PKL dalam melaksanakan tugas sebesar 36.3%, yang menyebutkan serius petugas pembinaan PKL dalam melaksanakan tugas sebesar 53.3%, yang menyebutkan sangat serius petugas pembinaan PKL dalam melaksanakan tugas sebesar 7.1%. Dalam keseriusan petugas pembinaan PKL dalam butir pertanyaan ini didapatkan penilaian tertinggi pada kategori serius yakni sebesar 53.3%.

Adapun pada butir pertanyaan tentang keseriusan petugas penertiban PKL mendapatkan jawaban dari responden seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 55. TINGKAT KESERiusAN PENERTIBAN PKL

No	Penertiban PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak serius	0	0
2.	Kurang serius	49	20.4
3.	Serius	183	76.3
4.	Sangat serius	8	3.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 52

Pada tabel IV.55. di atas menggambarkan dari 240 responden (100%), tidak ada responden yang menilai petugas penertiban PKL tidak serius dalam melaksanakan tugas penertiban, dan sebesar 20.4% responden yang menilai petugas penertiban PKL kurang serius dalam melaksanakan tugas penertiban, sedangkan yang menilai petugas penertiban PKL serius dalam melaksanakan tugas penertiban sebesar 76.3%, dan hanya 3.3% responden yang menilai petugas penertiban PKL sangat serius dalam melaksanakan tugas penertiban.

Pada butir pertanyaan kelima puluh tiga tentang keseriusan dalam melaksanakan tugas penyuluhan oleh Seksi Pembinaan PKL Pemerintah Kota Surakarta. Jawaban responden pada pertanyaan ini ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 56. TINGKAT KESERiusAN PENYULUHAN PKL

No	Penertiban PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak serius	7	2.9
2.	Kurang serius	65	27.1
3.	Serius	156	65.0
4.	Sangat serius	12	5.0
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 53

Tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa dari 240 responden (100%), 2.9% responden yang menjawab tidak serius petugas penyuluhan PKL dalam melaksanakan tugas, 27.1% responden yang menjawab kurang serius petugas penyuluhan PKL dalam melaksanakan tugas, 65% responden yang menjawab serius petugas penyuluhan PKL dalam melaksanakan tugas, 5% responden yang menjawab sangat serius petugas penyuluhan PKL dalam melaksanakan tugas. Butir pertanyaan ini didapatkan penilaian tertinggi pada kategori serius petugas penyuluhan PKL yakni sebesar 65% responden.

Indikator kejujuran pelaksana terdiri dari dua item pertanyaan yaitu tentang kejujuran pelaksana penertiban PKL dan kejujuran pelaksana penarik retribusi PKL. Pada item kejujuran pelaksana penertiban PKL dijawab responden sebagaimana tercantum pada tabel tabel IV. 57 dibawah yang menggambarkan dari 240 responden (100%), yang menjawab pelaksana penertiban PKL tidak jujur sebesar 0.4 % responden, yang menjawab pelaksana penertiban PKL kurang jujur sebesar 21.3% responden, yang menjawab pelaksana penertiban PKL jujur sebesar 67.1% responden, dan 11.3% yang menjawab pelaksana penertiban PKL sangat jujur.

Tabel IV. 57. TINGKAT KEJUJURAN PELAKSANA PENERTIBAN PKL

No	Kejujuran Pelaksana	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak jujur	1	.4
2.	Kurang jujur	51	21.3
3.	Jujur	161	67.1
4.	Sangat jujur	27	11.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 54

Apabila melihat tabel di atas dapat juga diartikan bahwa pelaksana penertiban PKL pada kategori jujur, karena jawaban responden yang menjawab sebesar 67.1%.

Pada item kelima puluh lima tentang kejujuran pelaksana penarikan retribusi PKL mendapatkan tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel IV. 58. TINGKAT KEJUJURAN PENARIKAN RETRIBUSI PKL

No	Kejujuran Penarikan Retribusi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak jujur	3	1.3
2.	Kurang jujur	54	22.5
3.	Jujur	156	65.0
4.	Sangat jujur	27	11.3
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 55

Dari 240 responden (100%), 1.3 % responden menjawab pelaksana penarikan retribusi PKL tidak jujur, 22.5% responden menjawab pelaksana penarikan retribusi PKL kurang jujur, 65% responden menjawab pelaksana penarikan retribusi PKL jujur, dan 11.3% responden menjawab pelaksana penarikan retribusi PKL sangat jujur. Tabel di atas juga dapat diinterpretasikan bahwa pelaksana penarikan PKL relatif jujur bila dilihat hasil jawaban responden sebesar 65% responden menyatakan jujur.

Pada indikator tindakan sanksi terhadap PKL yang melanggar ketertiban untuk mengetahui bagaimana tindakan pelaksana penertiban dalam melakukan tindakan terhadap PKL yang melanggar ketertiban. Responden memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang tindakan sanksi tersebut dicantumkan dalam tabel IV.59 yang dapat diartikan dari 240 responden (100%), yang menjawab tidak disiplin petugas penertiban dalam melakukan tindakan sanksi terhadap PKL sebesar 4.2% responden, yang menjawab kurang disiplin petugas

penertiban dalam melakukan tindakan sanksi terhadap PKL sebesar 35.4% responden, yang menjawab disiplin petugas penertiban dalam melakukan tindakan sanksi terhadap PKL sebesar 50.8% responden, yang menjawab sangat disiplin petugas penertiban dalam melakukan tindakan sanksi terhadap PKL sebesar 9.6% responden.

Tabel IV. 59. TINDAKAN SANKSI TERHADAP PKL PELANGGAR KETERTIBAN

No	Tindakan Sanksi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak disiplin	10	4.2
2.	Kurang disiplin	85	35.4
3.	Disiplin	122	50.8
4.	Sangat disiplin	23	9.6
	Jumlah	240	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner nomor 56

Angka-angka persentase dalam tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa pelaksana penertiban relatif disiplin dalam melaksanakan tindakan sanksi terhadap pelanggar ketertiban, sebagaimana ditunjukkan pada 50.8% menjawab disiplin.

Semua butir-butir pertanyaan dan jawaban responden pada variabel perilaku pelaksana telah diketahui dalam tabel dan uraian di atas. Dari hasil pengumpulan jawaban responden pada variabel perilaku pelaksana ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran baik atau tidaknya perilaku pelaksana pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta.

Gambaran perilaku pelaksana dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi perilaku pelaksana di bawah ini :

Tabel IV. 60. DISTRIBUSI FREKUENSI PERILAKU PELAKSANA

No.	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Buruk	13 - 17	85	35.4
2.	Cukup Baik	18 - 22	142	59.2
3.	Baik	23 - 27	13	5.4
	Jumlah		240	100

Sumber : Diolah dari jawaban No. 51-56

Pada tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa dari 240 responden (100%) dan menjawab tujuh butir pertanyaan kemudian dibagi dalam tiga kategori, maka dapat diketahui interval 13-17 pada kategori perilaku pelaksana buruk, yang menilai kategori ini sebanyak 85 responden (35.4%), pada nilai interval 18-22 pada kategori cukup baik frekuensinya 142 responden (59.2%), pada nilai interval 18-22 pada kategori baik frekuensinya 142 responden (5.4%).

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel perilaku pelaksana pada kategori relatif cukup baik dengan alasan 59,2% responden menilai pada kategori cukup baik, tetapi penilaian pada kategori buruk relatif cukup tinggi yakni sebesar 35% sedangkan yang menyatakan baik sebesar 5.4% sehingga perlu perhatian pada perilaku pelaksana karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan pula adanya perilaku pelaksana yang baik.

Hasil di atas bila dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban PKL RAS yang menyangkut perilaku pelaksana implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 adalah :

Perilaku pelaksana dapat dilihat dari tanggungjawab petugas seksi penataan, seksi pembinaan, seksi pembinaan dan seksi penertiban. Paguyuban apabila melakukan kegiatan selalu mengundang seksi-seksi tersebut di atas, memang tidak semua hadir pada kegiatan tersebut tetapi sering pula diwakilkan.

Apabila seksi penyuluhan melakukan kegiatan petugas melaksanakan dengan baik dan teman-teman PKL juga banyak yang hadir, memang tidak semua yang diundang hadir tetapi biasanya pamit dan apabila ada informasi yang penting akan disampaikan oleh teman-teman yang hadir.

B. Uji Validitas Dan Realibilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas diperlukan untuk menguji instrumen penelitian yang telah dikembalikan oleh 240 responden yaitu dengan cara mentabulasikan data yang diperoleh, maka pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen (Sugiyono, 1999:272).

Teknik pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Korelasi Product Moment Pearson. Sedangkan pengujian Reliabilitas menggunakan teknik Alpha Chronbach, kedua pengujian di atas dilakukan dengan bantuan *software* komputer SPSS.

Tidak ada batasan yang universal yang menunjuk kepada angka minimal yang harus dipenuhi agar suatu tes dikatakan valid. Koefisien validitas yang tidak begitu tinggi, misalnya berada sekitar angka 0,5 akan lebih dapat diterima dan dianggap memuaskan. Tetapi apabila koefisien validitas itu kurang dari 0,3 biasanya dianggap tidak memuaskan. Jadi suatu tes dapat dikatakan valid apabila memiliki koefisien validitas $r_{xy} \geq 0,3$. Pada penelitian ini sesuai dengan jumlah responden sebanyak 240 mempunyai nilai kritis dengan tingkat kesalahan 5% dalam tabel sebesar 0.128, artinya bahwa hasil pengujian validitas dikonsultasikan pada tabel menunjukkan lebih dari 0.128, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk mengetahui berapa besar hasil pengujian validitas masing-masing item pertanyaan dapat diperiksa pada lampiran hasil pengujian validitas.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas tiap-tiap variabel akan dibahas di bawah ini :

Hasil uji validitas implementasi kebijakan (Y) menunjukkan bahwa rentang validitas dari sebanyak 32 item pertanyaan sebesar 0.318-0.689 (periksa pada tabel hasil uji validitas implementasi kebijakan), hal ini bila dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment N=240 dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 0.128 maka $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga alat ukur yang digunakan untuk mengetahui variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dinyatakan valid. Ringkasan hasil uji validitas ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV.61 : HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Variabel	TOTAL	Keterangan	Variabel	Total	Keterangan
VAR00001	.480	Valid	VAR00017	.633	Valid
VAR00002	.417	Valid	VAR00018	.511	Valid
VAR00003	.504	Valid	VAR00019	.465	Valid
VAR00004	.540	Valid	VAR00020	.684	Valid
VAR00005	.603	Valid	VAR00021	.419	Valid
VAR00006	.520	Valid	VAR00022	.689	Valid
VAR00007	.674	Valid	VAR00023	.619	Valid
VAR00008	.587	Valid	VAR00024	.672	Valid
VAR00009	.665	Valid	VAR00025	.619	Valid
VAR00010	.531	Valid	VAR00026	.534	Valid
VAR00011	.508	Valid	VAR00027	.318	Valid
VAR00012	.358	Valid	VAR00028	.355	Valid
VAR00013	.572	Valid	VAR00029	.639	Valid
VAR00014	.327	Valid	VAR00030	.570	Valid
VAR00015	.659	Valid	VAR00031	.589	Valid
VAR00016	.656	Valid	VAR00032	.401	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil uji validitas kondisi lingkungan (X1) menunjukkan bahwa rentang validitas dari sebanyak 8 item pertanyaan sebesar 0.314-0.734 (periksa pada tabel hasil uji validitas kondisi lingkungan), nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment N=240 taraf kesalahan 5% sebesar 0.128, maka $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga alat ukur yang akan digunakan untuk mengetahui variabel Kondisi lingkungan pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dinyatakan valid. Secara ringkas ditampilkan uji validitas variabel kondisi lingkungan sebagai berikut :

Tabel IV.62 : HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KONDISI LINGKUNGAN

VARIABEL	TOTAL	Keterangan
VAR00001	.596	Valid
VAR00002	.614	Valid
VAR00003	.734	Valid
VAR00004	.561	Valid
VAR00005	.321	Valid
VAR00006	.351	Valid
VAR00007	.349	Valid
VAR00008	.314	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Pada pengujian terhadap 9 (sembilan) butir pertanyaan variabel komunikasi (X2) mendapatkan rentang validitas sebesar 0.523 – 0.813 (periksa pada tabel uji validitas komunikasi), nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan tabel r Produk Momen N=240 dengan taraf kesalahan 5% sebesar 0.128, maka $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga alat ukur yang akan digunakan untuk mengetahui variabel komunikasi pada keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah

Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dinyatakan valid. Untuk mengetahui hasil uji validitas sembilan butir pertanyaan pada variabel komunikasi ditampilkan tabel berikut ini :

Tabel IV.63 : HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KOMUNIKASI

VARIABEL	TOTAL	Keterangan
VAR00001	.716	Valid
VAR00002	.654	Valid
VAR00003	.813	Valid
VAR00004	.552	Valid
VAR00005	.523	Valid
VAR00006	.626	Valid
VAR00007	.621	Valid
VAR00008	.696	Valid
VAR00009	.544	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Sedangkan pada pengujian terhadap 7 (tujuh) item pertanyaan variabel perilaku pelaksana (X3) didapatkan angka rentang validitas sebesar 0.457 – 0.778 (periksa pada tabel uji validitas perilaku pelaksana), angka tersebut bila dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment N=240 dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 0.128, maka $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga alat ukur yang akan digunakan untuk mengetahui variabel perilaku pelaksana pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dinyatakan valid. Pada tabel di bawah ini secara ringkas ditampilkan hasil uji tujuh butir pertanyaan pada variabel perilaku pelaksana.

Tabel IV.64 : HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PERILAKU PELAKSANA

VARIABEL	TOTAL	Keterangan
VAR00001	.778	Valid
VAR00002	.671	Valid
VAR00003	.457	Valid
VAR00004	.601	Valid
VAR00005	.576	Valid
VAR00006	.611	Valid
VAR00007	.709	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

2. UJI RELIABILITAS

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menguji reliabilitas memanfaatkan uji keandalan teknik Alpha Cronbach. Koefisien Alpha Chronbach akan memberikan harga yang lebih kecil atau yang lebih besar dengan angka kritis(*critical value*) jumlah item pertanyaan (angka reliabilitas dalam tabel). Artinya jika nilai yang diberikan oleh hasil uji reliabilitas lebih besar dari nilai tabel dapat disebut kuesioner tersebut reliabel.

a. Uji Reliabilitas Implementasi Kebijakan

Tabel IV. 65 : Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Implementasi Kebijakan

Pertanyaan	N	Variance	Pertanyaan	N	Variance
Item 1	240	.378	Item 17	240	1.196
Item 2	240	.605	Item 18	240	.537
Item 3	240	.447	Item 19	240	.605
Item 4	240	.572	Item 20	240	.703
Item 5	240	.485	Item 21	240	.515
Item 6	240	.644	Item 22	240	1.188
Item 7	240	.636	Item 23	240	.795
Item 8	240	.616	Item 24	240	.839
Item 9	240	.669	Item 25	240	.751
Item 10	240	.477	Item 26	240	.477
Item 11	240	.756	Item 27	240	1.259
Item 12	240	.442	Item 28	240	1.154
Item 13	240	.744	Item 29	240	.959
Item 14	240	1.209	Item 30	240	.723
Item 15	240	.766	Item 31	240	.685
Item 16	240	.702	Item 32	240	.563
			TOTAL	240	210.213
			Valid N (listwise)	240	

Jumlah Variance Butir = 23,188

Total Variance = 210,213

Perhitungan Uji Reliabilitas dengan Rumus Alpha

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

$$r_{11} = \left[\frac{32}{(32-1)} \right] \left[1 - \frac{23.188}{210.213} \right]$$

$$r_{11} = (1.032)(1 - 0,110)$$

$$r_{11} = (1,032)(0,890)$$

$$r_{11} = 0,918$$

Dari hasil perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,918. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $n = 240$ dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,128. Karena $r_{11} > r_t$ atau $0,918 > 0,128$ maka item pernyataan angket tersebut reliabel. Atau dapat pula dikatakan bahwa reliabilitasnya sangat tinggi.

b. Uji Reliabilitas Kondisi Lingkungan

Tabel IV. 66 :Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Kondisi Lingkungan

Pertanyaan	N	Variance
Item 1	240	.548
Item 2	240	.459
Item 3	240	.527
Item 4	240	.777
Item 5	240	.561
Item 6	240	.456
Item 7	240	.252
Item 8	240	.232
TOTAL	240	7.084
Valid N (listwise)	240	

$$\text{Jumlah Variance Butir} = 3,811$$

$$\text{Total Variance} = 7,084$$

Perhitungan Uji Reliabilitas dengan Rumus Alpha

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

$$r_{11} = \left[\frac{8}{(8-1)} \right] \left[1 - \frac{3.811}{7.084} \right]$$

$$r_{11} = (1.143)(1-0,538)$$

$$r_{11} = (1,143)(0,462)$$

$$r_{11} = 0,528$$

Dari hasil perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,528. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $n = 240$ dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,128. Karena $r_{11} > r_t$ atau $0,528 > 0,128$ maka item pernyataan angket tersebut reliabel. Atau dapat pula dikatakan bahwa reliabilitasnya sedang.

c. Uji Reliabilitas Komunikasi

Tabel IV. 67 : Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Komunikasi

Pertanyaan	N	Variance
Item 1	240	.829
Item 2	240	.972
Item 3	240	1.071
Item 4	240	.600
Item 5	240	.580
Item 6	240	.659
Item 7	240	.774
Item 8	240	.740
Item 9	240	.716
TOTAL	240	20.481
Valid N (listwise)	240	

$$\text{Jumlah Variance Butir} = 5,569$$

$$\text{Total Variance} = 20,481$$

Perhitungan Uji Reliabilitas dengan Rumus Alpha

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

$$r_{11} = \left[\frac{9}{(9-1)} \right] \left[1 - \frac{5,569}{20,481} \right]$$

$$r_{11} = (1,125)(1-0,272)$$

$$r_{11} = (1,125)(0,728)$$

$$r_{11} = 0,819$$

Dari hasil perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,819. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $n = 240$ dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,128. Karena $r_{11} > r_t$ atau $0,819 > 0,128$ maka item pernyataan angket tersebut reliabel. Atau dapat pula dikatakan bahwa reliabilitasnya sangat tinggi.

d. Uji Reliabilitas Perilaku Pelaksana

Tabel IV. 68 : Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas Perilaku Pelaksana

Pertanyaan	N	Variance
Item 1	240	.620
Item 2	240	.468
Item 3	240	.209
Item 4	240	.361
Item 5	240	.331
Item 6	240	.370
Item 7	240	.502
TOTAL	240	6.982
Valid N (listwise)	240	

$$\text{Jumlah Variance Butir} = 2,862$$

$$\text{Total Variance} = 6,982$$

Perhitungan Uji Reliabilitas dengan Rumus Alpha

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum ob^2}{ot^2} \right]$$

$$r_{11} = \left[\frac{7}{(7-1)} \right] \left[1 - \frac{2.862}{6.982} \right]$$

$$r_{11} = (1.167)(1-0,410)$$

$$r_{11} = (1,167) (0,590)$$

$$r_{11} = 0,687$$

Dari hasil perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,687. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $n = 240$ dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,128. Karena $r_{11} > r_t$ atau $0,687 > 0,128$ maka item pernyataan angket tersebut reliabel. Atau dapat pula dikatakan bahwa reliabilitasnya tinggi.

Tabel IV.69 : RANGKUMAN HASIL UJI RELIABILITAS

No	Pertanyaan dalam Kuesioner	Besarnya angka kritis N=240	Nilai Alpha
1	Implementasi kebijakan	0.128	0,918
2	Kondisi lingkungan	0.128	0,528
3	Komunikasi	0.128	0,819
4	Perilaku pelaksana	0.128	0,687

Sumber : Data Primer Diolah

C. Uji Hipotesis

Seperti diuraikan pada tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Untuk mengetahui hubungan variabel terikat dan variabel bebas diperlukan pengujian kedua variabel. Dari hasil penghitungan kategori variabel implementasi kebijakan, kondisi lingkungan dan perilaku pelaksana bila hasil jawaban responden dari variabel terikat disilangkan dengan variabel bebas akan mengetahui berapa tingkat hubungan variasi jawaban pada kedua variabel tersebut.

1. Uji Hipotesis Minor Pertama

Hubungan silang dari implementasi kebijakan dengan kondisi lingkungan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 70: HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DENGAN KONDISI LINGKUNGAN

VARIABEL	KONDISI LINGKUNGAN				
	KATEGORI	RENDAH	SEDANG	TINGGI	JUMLAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	RENDAH	9 (3,8%)	61 (25,4%)	0 (0%)	70 (29,2%)
	SEDANG	26 (10,8%)	53 (22,1%)	11 (4,6%)	90 (37,5%)
	TINGGI	1 (0,4%)	41 (17,1%)	38 (15,8%)	80 (33,3%)
	JUMLAH	36 (15%)	155 (64,6%)	49 (20,4%)	240 (100%)

Tabel di atas ditafsirkan, bahwa dari 240 responden (100%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah dan kondisi lingkungan rendah sebanyak 9 (3,8%) responden, sedangkan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah tetapi kondisi lingkungan sedang sebanyak 61 (25,4%) responden, dan tidak ada 0 (0%) responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah tetapi kondisi lingkungan tinggi.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang tetapi kondisi lingkungan pada kategori rendah sebanyak 10,8%, adapun yang menyebutkan implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang sebanyak 22,1%, dan yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan juga menyebutkan kondisi lingkungan kategori tinggi sebanyak 4,6%.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta pada kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori rendah 1 responden (0,4%), sedangkan yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori sedang sebanyak 41 responden (17,1%), tetapi terdapat 15,8% responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi pada kategori tinggi.

Dari hasil tabel silang pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan variabel kondisi lingkungan terdapat hubungan yang bervariasi. Persentase terbesar terlihat pada

hubungan antara implementasi kebijakan rendah dan kondisi lingkungan kategori sedang yaitu sebesar 61(25.4%). Akan tetapi terbesar kedua pada responden 22,1% yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan rendah sebanyak 36 responden (15%). Dan yang menyatakan kondisi lingkungan rendah sebesar 70 responden 29,2%. Hal ini menggambarkan kedua variabel tersebut perlu ditingkatkan untuk memperbaiki implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Penelitian ini berasumsi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik *Korelasi Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{xly} = 0.523$, nilai ini bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* $N = 240$ tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan "Ada pengaruh yang positif antara kondisi lingkungan di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995" diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel kondisi lingkungan meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel kondisi lingkungan menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan.

2. Uji Hipotesis Minor Kedua

Sebagaimana dalam tujuan penelitian yang berkeinginan untuk mengetahui gambaran dari implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi, maka dari hasil kategori implementasi kebijakan dan kategori komunikasi disilangkan dan mendapatkan gambaran sebagaimana tercantum dalam berikut ini :

Tabel IV. 71: HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DENGAN KOMUNIKASI

VARIABEL	KOMUNIKASI				
	KATEGORI	RENDAH	SEDANG	TINGGI	JUMLAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	RENDAH	26 (10,8%)	42 (17,5%)	2 (0,8%)	70 (29,2%)
	SEDANG	9 (3,8%)	62 (25,8%)	19 (7,9%)	90 (37,5%)
	TINGGI	1 (0,4%)	30 (12,5%)	49 (20,4%)	80 (33,3%)
	JUMLAH	36 (15%)	134 (55,8%)	70 (29,2%)	240 (100%)

Tabel di atas dapat digambarkan bahwa dari dua ratus empat puluh responden terdapat 10,8% menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori rendah, 17,5% menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori rendah dan komunikasi kategori sedang, dan hanya 0,8% responden yang menyatakan komunikasi kategori tinggi dan kategori implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah.

Pada tabel di atas didapatkan 3,8% responden menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi kategori

rendah, adapun yang menyatakan implementasi kebijakan dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 25,8%, dan 7,9% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi pada kategori tinggi.

Ditemukan 1 responden (0,4%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori tinggi, adapun yang menyatakan implementasi kebijakan pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 12,5%, tetapi terdapat 20,4% responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori tinggi.

Hasil di atas menggambarkan bahwa hubungan antara implementasi kebijakan dan komunikasi sebagian besar berada pada kategori sedang yaitu 25,8%. Sedangkan pada kategori rendah antara implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi sebesar 10,8 %, dan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi tinggi sebesar 20.4%. Dari angka-angka yang cukup bervariasi tersebut yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota yaitu pada kategori implementasi kebijakan dan komunikasi rendah. Dengan meningkatkan kejelasan kebijakan, meningkatkan kesesuaian kebijakan dengan realitas di lapangan, meningkatkan kemampuan pelaksana dari atas sampai bawah sehingga komunikasi kebijakan lancar pada saat implementasi.

Penelitian ini juga mengasumsikan adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik *Korelasi Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x2y} = 0.712$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* N 240 tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan "Ada pengaruh yang positif antara komunikasi di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995" diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel komunikasi meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel komunikasi menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r hitung setelah dikonsultasikan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

3. Uji Hipotesis Minor ketiga

Demikian pula untuk mengetahui hubungan implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana diperlukan penyilangan dari dua kategori variabel implementasi kebijakan dengan perilaku pelaksana. Hubungan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 72 : HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DENGAN PERILAKU PELAKSANA

VARIABEL	PERILAKU PELAKSANA				
	KATEGORI	RENDAH	SEDANG	TINGGI	JUMLAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	RENDAH	55 (22,9%)	15 (6,25%)	0 (0%)	70 (29,2%)
	SEDANG	25 (10,4%)	65 (27,1%)	0 (0%)	90 (37,5%)
	TINGGI	5 (2,1%)	62 (25,8%)	13 (5,4%)	80 (33,3%)
	JUMLAH	85 (35,4%)	142 (59,2%)	13 (5,4%)	240 (100%)

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 240 responden (100%), yang menyatakan perilaku pelaksana dan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah sebesar 22,9%. Adapun yang menyatakan perilaku pelaksana kategori sedang dan implementasi kebijakan kategori rendah sebesar 6,25%. Bahkan yang menyatakan implementasi kebijakan kategori rendah dan perilaku pelaksana rendah tidak ada (0%).

Penilaian responden yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana kategori rendah sebesar 10,4%, dan terdapat 27,1% responden menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan perilaku pelaksana pada kategori sedang, sedangkan tidak ada 0% yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana pada kategori tinggi.

Penilaian tentang implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan perilaku pelaksana pada kategori rendah hanya 2,1%. Adapun

yang menilai implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 tinggi dan perilaku pelaksana sedang sebanyak 25,8%. Dan penilaian implementasi kebijakan tinggi dan perilaku pelaksana tinggi hanya 5,4%.

Hasil tabel silang di atas menggambarkan bahwa hubungan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dengan perilaku pelaksana sangat erat, karena bila dilihat penilaian responden implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana rendah sebesar 22,9%. Dan penilaian sedang terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kategori rendah terhadap perilaku pelaksana sebanyak 10,4%. Sehingga perilaku pelaksana sangat berhubungan erat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, karena bila perilaku pelaksana rendah, implementasi kebijakan akan rendah dan bila perilaku pelaksana tinggi, maka implementasi kebijakan akan tinggi pula.

Asumsi adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan perlu dibuktikan dengan pengujian hipotesis.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik *Korelasi Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{xy} = 0.693$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* N 240 tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara perilaku pelaksana dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan "Ada pengaruh yang positif antara perilaku pelaksana di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8

Tahun 1995” diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel perilaku pelaksana meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel perilaku pelaksana menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r hitung setelah dikonsultasikan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

4. Uji Hipotesis Mayor

Pernyataan hipotesis mayor yang menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan koefisien korelasi ganda (R) didapatkan hasil koefisien determinasi (R^2) = 0,662 artinya variasi pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ditentukan oleh variasi kondisi lingkungan (X_1), komunikasi (X_2), Perilaku pelaksana (X_3) sebesar 66.2%.

Untuk menghitung $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,662} = 0,814$, hasil ini lebih besar bila dikonsultasikan dengan table r dengan taraf signifikansi 5% dan $N= 240$ diperoleh nilai kritis sebesar 0,128, sehingga dapat disimpulkan “Ada pengaruh yang signifikan antara Kondisi Lingkungan, Komunikasi dan Perilaku Pelaksana terhadap keberhasilan Implementasi Perda No. 8 Tahun 1995”

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana disebutkan Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994: 19-21) adanya enam variabel untuk mengetahui hasil suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana.

Pada penelitian ini mengadopsi dari teori pokok di atas dengan memodifikasi variasi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Komunikasi, dan Perilaku Pelaksana. Kondisi Lingkungan diturunkan dari kondisi lingkungan kebijakan yang meliputi: kondisi sosial, ekonomi dan politik, Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi, dan Perilaku Pelaksana diturunkan dari Sikap Pelaksana.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uji hipotesis dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, yang menyebutkan faktor kondisi lingkungan berada pada kategori sedang karena dari 240 responden (100%) paling besar 155 responden (64.6%) menjawab pada kategori cukup, faktor komunikasi pada kategori cukup lancar dengan alasan dari 240 responden (100%) sejumlah 134 responden (55.8%) menjawab pada kategori cukup lancar, dan faktor perilaku pelaksana juga pada kategori sedang karena didapatkan jawaban dari 240 responden (100%), ada 142 responden (59.2%) yang menjawab dikategorikan cukup baik. Dan pada variabel tergantung implementasi kebijakan juga dikategorikan sedang karena dari 240 responden (100%) ditemukan 90 responden (37.5%) menjawab pada kategori cukup berhasil.

Kategori implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh jawaban responden yang tampak pada tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan yang ditampilkan dan diuraikan sebelumnya. Penilaian yang sangat menonjol baik pada keadaan positif maupun negatif adalah pada indikator pembinaan jawaban responden cenderung kearah positif sedangkan indikator penataan cenderung ke arah negatif seperti pelaksanaan penataan PKL penilaian tertinggi pada kadang-kadang dilakukan penataan. Cara yang dilakukan oleh Seksi penataan PKL Pemerintah Kota Surakarta terhadap PKL juga dirasakan kurang tepat karena penilaian tertinggi pada jawaban kurang tepat. Demikian pula pada sifat penataan dan manfaat penataan menurut responden sifat penataan yang dilakukan cenderung relatif tidak menyenangkan PKL dan cenderung tidak bermanfaat bagi PKL.

Dari tujuh butir pertanyaan indikator penyuluhan responden merasakan bermanfaat karena setelah mendapatkan penyuluhan dan pembimbingan merasakan usahanya meningkat dan dapat berlangsung cukup baik. Bahkan yang sangat dirasakan keuntungannya adalah meningkatnya jumlah kemitraan dalam usaha dan kelangsungan kemitraan itu dalam kegiatan usahanya.

Kecenderungan ke arah negatif ditemukan pada penempatan zona larangan PKL karena responden menyebutkan cukup patuh tetapi responden yang lain lebih banyak memilih pada jawaban tidak patuh, hal ini dikarenakan pengenaan sanksi yang diberikan pada PKL pelanggar zona larangan cenderung relatif kurang tegas.

Hasil tabel tunggal pada indikator variabel kondisi lingkungan menunjukkan pada interpretasi bahwa responden cenderung menilai kearah positif seperti

diantaranya tingkat kerjasama dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan cukup bisa kerjasama bahkan cenderung kearah kerjasama yang baik. Demikian pula pada kemacetan lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas di lingkungan PKL responden menilai kearah positif, bahkan pada pertanyaan tentang persetujuan dan kerahamah warga setempat terhadap usaha yang dilakukan PKL, responden menjawab paling tinggi setuju dan ramah dan bila dilihat frekuensi jawaban responden cenderung ke arah sangat setuju dan sangat ramah.

Sedangkan pada variabel komunikasi, bila dilihat dari tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan secara keseluruhan jawaban responden relatif cukup lancar tetapi menurut peneliti jawaban responden cenderung ke arah tidak lancar karena terdapat butir-butir jawaban responden selain yang menyatakan cukup, paling tinggi kedua adalah kurang. Seperti diantaranya pemahaman PKL terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 bila dibandingkan responden yang menjawab tidak paham ditambah yang kurang paham dengan yang menjawab paham dan sangat paham persentasenya banyak yang menjawab tidak paham dan kurang paham yaitu sebesar 57.1%. Pada item pertanyaan dalam indikator komunikasi juga ditanyakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan dalam implementasi kebijakan. Pertanyaan tentang bagaimana kemampuan pelaksana penyuluhan, pembinaan, penertiban dalam melaksanakan tugasnya. Responden menjawab paling tinggi pada kategori cukup mampu, tetapi cenderung ke arah negatif atau tidak mampu. Demikian juga pada tingkat kejelasan yang diterima oleh penerima pesan

yaitu PKL, responden menyebutkan paling tinggi pada kategori jelas, tetapi kategori tertinggi kedua pada kurang jelas dan tidak jelas.

Variabel perilaku pelaksana pada kategori cukup baik meskipun kecenderungan pada kategori buruk seperti ditunjukkan pada tabel IV.60, yang menyebutkan pada kategori baik hanya 13 dari 240 responden tetapi yang menyebutkan pada kategori buruk sebanyak 85 dari 240 responden.

Seperti ditunjukkan pada tabel tunggal dari masing-masing butir pertanyaan pada indikator perilaku pelaksana yang memperlihatkan kategori cukup baik tetapi kecenderungan ke arah negatif, diantaranya pada butir pertanyaan tentang ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan, keseriusan penyuluhan, keseriusan penertiban, keseriusan pembinaan, kejujuran penertiban, kejujuran penarikan retribusi dan tindakan sanksi pelanggar ketertiban. Terlihat paling menonjol pada butir pertanyaan tentang ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan dan keseriusan pembinaan kecenderungannya relatif negatif.

Hasil uji regresi dalam penelitian ini didapatkan persamaan secara statistik dapat $Y = - 11.0 + 1.73 X_1 + 1.58 X_2 + 1.14 X_3$, persamaan tersebut dapat diartikan hubungan pengaruh antara kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana, dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan signifikan secara statistik.

Persamaan regresi di atas dapat diartikan koefisien variabel kondisi lingkungan sebesar 1.73 artinya bila variabel kondisi lingkungan naik 1 (satu) "unit" maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami peningkatan sebesar 1.73.

Pada koefisien variabel komunikasi sebesar 1.58 yang berarti apabila variasi kondisi lingkungan mengalami peningkatan satu "unit", maka variabel implementasi kebijakan juga akan naik sebesar 1.58. Dan pada koefisien variabel perilaku pelaksana sebesar 1.14 berarti bila variasi perilaku pelaksana naik satu "unit", maka implementasi kebijakan akan meningkat sebesar 1.14.

Untuk mengetahui tingginya kontribusi pengaruh masing-masing variabel terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan diperlukan perhitungan sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE), berikut ini diuraikan perhitungan sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE)

1. Sumbangan Relatif (SR)

$$JK_{reg} = b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y$$

$$JK_{reg} = (1,73 \times 4.836,029) + (1,58 \times 1.157,938) + (1,14 \times 6.344,204)$$

$$JK_{reg} = 33.228,265$$

a. Sumbangan Relatif X_1 terhadap Y

$$SR X_1 = \frac{a_1 \sum x_1 y}{JK(Reg)} \times 100\%$$

$$SR X_1 = \frac{(1,73 * 4.836,029)}{33.228,265} \times 100\%$$

$$SR X_1 = 0,2518 \approx 25\%$$

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 25% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

b. Sumbangan Relatif X_2 terhadap Y

$$SR X_2 = \frac{a_2 \sum x_2 y}{JK(Reg)} \times 100\%$$

$$SR X_2 = \frac{(1,58 * 11.157,938)}{33.228,265} \times 100\%$$

$$SR X_2 = 0,5306 \approx 53\%$$

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 53% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

c. Sumbangan Relatif X_3 terhadap Y

$$SR X_3 = \frac{a_3 \sum x_3 y}{JK(Reg)} \times 100\%$$

$$SR X_3 = \frac{(1,14 * 6.344,204)}{33.228,265} \times 100\%$$

$$SR X_2 = 0,2177 \approx 22\%$$

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 22% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

2. Sumbangan Efektif (SE)**a. Sumbangan Efektif X_1**

$$SE X_1 = 0,662 \times 0,2518$$

$$SE X_1 = 0,1668 = 16,68\%$$

b. Sumbangan Efektif X_2

$$SE X_2 = 0,662 \times 0,5306$$

$$SE X_2 = 0,3513 = 35,13\%$$

c. Sumbangan Efektif X_3

$$SE X_2 = 0,662 \times 0,2177$$

$$SE X_2 = 0,1441 = 14,41\%$$

Hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui hasil besarnya sumbangan atau kontribusi masing masing variable bebas terhadap variable terikat :

1. Sumbangan variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 16,68 %.
2. Sumbangan variabel komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 35,13 %.
3. Sumbangan variabel perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 14,41 %.

Hasil perhitungan sumbangan efektif (SE) di atas kondisi lingkungan menyumbang 16.68%, komunikasi menyumbang 35,13%, perilaku pelaksana menyumbang 14.41%, apabila dijumlah sebesar 66,22% adalah kontribusi ketiga variabel dalam penelitian ini. Adapun sisanya sebesar 33.78% ditentukan oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa komunikasi paling berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan yang menggunakan indikator kebersihan, keindahan dan kenyamanan, keamanan, kerawanan lalu lintas, persetujuan warga, dan hasil wawancara yang menggunakan indikator bentuk kegiatan, tanggapan umum kondisi lingkungan menghasilkan bahwa kondisi lingkungan yang cukup bersih, aman dan kenyamanan di lingkungan usaha PKL di Kecamatan Laweyan. Hasil kualitatif tersebut bila dikonsultasikan dengan hasil tabel silang disimpulkan bahwa hubungan variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan variabel kondisi lingkungan terdapat hubungan yang bervariasi. Persentase terbesar terlihat pada hubungan antara implementasi kebijakan rendah dan kondisi lingkungan kategori sedang yaitu sebesar 61(25.4%). Akan tetapi terbesar kedua pada responden 22,1% yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan rendah sebanyak 36 responden (15%). Dan yang menyatakan kondisi lingkungan rendah sebesar 70 responden 29,2%.

2. Hasil analisis data kuantitatif hubungan antara implementasi kebijakan dan komunikasi sebagian besar berada pada kategori sedang yaitu 25,8%. Sedangkan pada kategori rendah antara implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi sebesar 10,8 %, dan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi tinggi sebesar 20,4%. Dari angka-angka yang cukup bervariasi tersebut yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta yaitu pada kategori implementasi kebijakan dan komunikasi rendah, hasil ini sesuai data kualitatif yang menyebutkan kurang jelasnya definisi PKL dari segi jenis usaha, pelaku usaha, sifat usaha.
3. Hubungan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dengan perilaku pelaksana sangat erat, karena bila dilihat penilaian responden implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana rendah sebesar 22,9%. Dan penilaian sedang terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kategori rendah terhadap perilaku pelaksana sebanyak 10,4 %. Sehingga perilaku pelaksana sangat berhubungan erat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, karena bila perilaku pelaksana rendah, implementasi kebijakan akan rendah dan bila perilaku pelaksana tinggi, maka implementasi kebijakan akan tinggi pula.
4. Hasil hitung koefisien korelasi determinasi (R^2) = 66,22% artinya variasi di dalam variabel keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kondisi

lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana sebesar 66.22%. Dari 66.22% tersebut variabel kondisi lingkungan menyumbang sebesar 16,68 %, variabel komunikasi menyumbang 35,13 % variabel perilaku pelaksana 14,41 %, Adapun sisanya sebesar 33.78% ditentukan oleh variabel lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis ajukan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan di Pemerintah Kota Surakarta.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setelah diketahui hasil jawaban responden tentang keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, diperlukan perbaikan pada sistem penataan PKL, tata cara pelaksanaan PKL agar PKL merasakan kemanfaatan yang cukup tinggi. Termasuk juga perlunya penerapan sanksi dilakukan secara tegas karena PKL merasa tidak patuh apabila pelanggar zona larangan tidak ditindak secara tegas.
2. Peningkatan pemeliharaan pada kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi karena tingkat kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas perlu dijaga.
3. Pada faktor komunikasi perlu peningkatan pemahaman bagi para pelaksana terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 untuk meningkatkan kemampuan sehingga

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi peraturan, dan penerima pesan dalam hal ini PKL mendapatkan kejelasan tentang Perda No. 8 Tahun 1995.

4. Perlunya peningkatan perilaku pelaksana yakni peningkatan kemampuan pada seksi pembinaan, penataan dan penertiban seperti pada ketepatan waktu, keseriusan pelaksana, keseriusan, dan kejujuran pelaksana.
5. Karena keterbatasan penelitian ini maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut karena hasil penelitian ini menyebutkan variabel kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana hanya menyumbang sebagian dari variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan. Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dengan menambah indikator dalam variabel yang sudah ada atau menambah variabel yang belum diteliti dan dimungkinkan adanya dampak kebijakan terhadap kegiatan ekonomi PKL. Variabel yang perlu diteliti adalah faktor kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan pada sekitar PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrakirana, Kamala dan Isono Sadoko, 1995, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta 2002 (Hasil Pendataan PKL Tahun 2002), Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta..
- Firadausy, Carunia Mulya, 1995, (Penyunting), *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Diperkotaan*, Dewan Riset Nasional, Jakarta,
- Gibson, Ivancevich, 1996, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*, Binarupa Aksara, Jakarta,
- Henry, Nicolas, 1995, *Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Islamy, M Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer, 1996 (Penyunting), *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Kota*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sugiyono, 2000, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedua, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2000, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Fisipol UGM, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solicin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan Negara Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Surat Kabar

Bengawan Pos, 4 Maret 2003

Suara Merdeka, 15 April 2003

Suara Merdeka, 17 April 2003

Suara Merdeka 10 April 2003

Solo Pos, 26 Februari 2003.

Solo Pos, 8 Februari 2003.

Solo Pos, 14 Januari 20003.

Peraturan-Peraturan dan Perundangan

Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang 2001, *Buku Pedoman Penyusunan Tesis.*

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 *Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.*

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2001 *Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.*

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2. Tahun 2001 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No, 8 Tahun 1995 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.*

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 41 Tahun 2001 *Tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta.*

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 511/305/111/1/ 2001 *Tentang Pembentukan Tim, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima dan Tim Operasi Lapangan Pedagang Kaki Lima.*

Tesis

Navvarone, Okki, 2002, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11 Tahun 2000 Di Kecamatan Semarang Tengah,*
Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Undip, Semarang

Sudewa, 2001, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Lingkungan Fisik Kawasan Monument Perjuangan 45 Surakarta*, Tesis, Magister Teknik Pembangunan Kota Undip Semarang.

Widodo, Ahmadi, 2000, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kota Semarang)*, Tesis, Magister Teknik Pembangunan Kota . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Makalah

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan ,1980, *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Madya Bandung* , Bahan Seminar Menggali Potensi PK Sebagai Unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah.